



REVITALISASI DAN DIGITALISASI MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA

REVITALISASI DAN DIGITALISASI MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA



LPPM UPNVY Press

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Pusat, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Jl.
Padjajaran (Ring Road Utara) No.104, Sleman, Yogyakarta
55283. Telp. (0274)486733, Fax. (0274) 486400



Penulis

Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si
Yenni Sri Utami, M.Si



***REVITALISASI DAN
DIGITALISASI
MONUMEN PERS
NASIONAL SURAKARTA***

Penulis:

Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si
Yenni Sri Utami, M.Si

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

REVITALISASI DAN DIGITALISASI MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penulis

Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si

Yenni Sri Utami, M.Si

Editor: Dr. Ismail Cawidu

Cetakan Pertama, Juli 2021

ISBN:

ISBN 978-623-6896-77-8



Diterbitkan oleh

LPPM UPNVY Press

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jl. Padjajaran (Ring Road Utara) No.104, Depok, Sleman,
Yogyakarta 55283. Telp. (0274) 486188, 486733, Fax. (0274)
486400

Prakata

Segala puji bagi Allah SWT, buku Revitalisasi dan Digitalisasi Monumen Pers Nasional Surakarta telah rampung dan diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Buku ini merupakan hasil kajian dan kolaborasi dengan Monumen Pers Nasional Surakarta melalui sejumlah tahapan kajian dan penelitian bersama.

Pertama, posisi Monumen Pers Nasional Surakarta di tengah pandemi Covid-19 dan di tengah gelombang Revolusi Industri 4.0 yang serta terdigitalisasi, telah menginspirasi penulis dan juga menjadi kesadaran pihak Monumen Pers Nasional untuk mereposisi dan melakukan revitalisasi

Kedua, mengkaji tentang jenis layanan yang diberikan Monumen Pers Nasional kepada Publik dan merancang strategi pelayanan itu sendiri secara milenial dan digital. Perubahan ini merupakan tantangan dan peluang sekaligus bagi reposisi Monumen Pers di tengah-tengah generasi milenial.

Ketiga, mengkaji bersama dan membangun rancangan model yang diproyeksikan bagi arah pelayanan dan tata kelola Monumen Pers Nasional secara digital.

Tahapan-tahapan tersebut menjadi acuan bagi penyusunan buku ini. Judul Revitalisasi dan Digitalisasi Monumen Pers Nasional Surakarta menjadi pilihan penulis untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di Monumen Pers Nasional dan Proyeksi atas Tata Kelola Layanan Monumen Pers Nasional ke depan seiring dengan tren digitalisasi layanan pada sektor-sektor publik termasuk pada Monumen Pers Nasional Surakarta yang menjadi bagian dari IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Sebagai karya akademik, tentu banyak pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM UPN Veteran Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan karya ini melalui hibah Penelitian Terapan Internal. Penulis juga ingin mengucapkan kepada Monumen Pers Nasional

khususnya Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta Widodo Hastjaryo MSi yang telah memberi keleluasaan peneliti untuk mendapatkan data dan diskusi intensif yang menarik dan mendalam.

Dukungan pihak Jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta juga telah berkontribusi signifikan bagi terselesaikannya karya akademik ini. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta Dr Agung Prabowo, MSi, penulis ucapkan terima kasih.

Pada akhirnya penulis berharap agar kiranya, buku sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan kebijakan tentang tata kelola dan pelayanan bagi Monumen Pers Nasional Surakarta yang kaya akan data-data pers masa lalu dan artefak-artefak lainnya yang berhubungan dengan pers, sejarah dan perjuangan bangsa.

Barangkali ada kemanfaatan yang lebih luas lagi terkait dengan pengelolaan Museum, Monumen atau Galery. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan

artefak, kekayaan benda-benda bersejarah, benda-benda seni yang tak ternilai, atau benda-benda bernilai lainnya. Dengan membawa buku, semoga memunculkan inspirasi bagaimana mengelolanya dengan professional dan menarik. Terima kasih.

Yogyakarta, Agustus 2021

Penulis

Basuki Agus Suparno

Yenni Sri Utami

KATA SAMBUTAN

Saya menyambut gembira dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya buku Revitalisasi dan Digitalisasi Monumen Pers Nasional Surakarta sebagai karya kolaboratif antara para Peneliti dari UPN Veteran Yogyakarta khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi dengan Monumen Pers Nasional Surakarta.

Kerjasama semacam ini memiliki arti penting. Pertama, bagi Monumen Pers Nasional Surakarta itu sendiri. Sebagai lembaga yang memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang menyangkut data-data dan artefak-artefak pers nasional, dapat dilipatgandakan kegunaannya. Monumen Pers Nasional kemudian semakin dikenal sebagai pusat data dan informasi tentang perjalanan pers nasional di Indonesia.

Kedua, manfaat bagi para akademisi dan peneliti seperti yang dilakukan ini. Dengan pisau analisis dan kemampuan konseptualnya, apa yang ada dan dilakukan Monumen Pers Nasional Surakarta disajikan melalui pendekatan ilmiah, prosedur-prosedur dan pengujian-pengujian.

Semua itu, barangkali sangat jarang disentuh dan dihampiri oleh pengelola Monumen Pers Nasional sendiri. Kenapa demikian? Karena fokusnya bukan pada pendekatan akademik seperti itu, melainkan bagaimana pelayanan yang diberikan semakin hari semakin baik dan menarik.

Dengan demikian, kehadiran para peneliti yang menaruh minat pada Monumen Pers Nasional dengan segala perspektif dan pendekatannya pada gilirannya mengukuhkan eksistensi Monumen Pers Nasional Surakarta.

Revitalisasi dan Digitalisasi ini sendiri dilakukan Monumen Pers Nasional Surakarta terkait dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pertama, perseptual masyarakat terhadap

Monumen Pers Nasional yang lama. Kedua, perkembangan industri yang telah sampai pada revolusi 4.0 atau bahkan sudah 5.0. Ketiga, perubahan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan tata kelola monumen, museum dan galery yang terus berkembang dan dengan model yang bermacam-macam.

Kondisi-kondisi itulah menggerakkan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatik RI untuk menyegarkan keberadaan Monumen Pers Nasional Surakarta. Dengan dukungan kebijakan tersebut, revitalisasi dan digitalisasi telah dilaksanakan serta masih terus berlangsung. Oleh karena itu, performa Monumen Pers Nasional Surakarta mengalami perubahan yang lebih menarik, artistik dan lebih nyaman.

Buku yang telah dituliskannya ini setidaknya mencerminkan hal tersebut. Sekaligus menunjukkan kepada kita bagaimana Museum, Monumen dan Galery yang ada di seantero

Indonesia dapat dikelola dengan cara-cara pengelolaan yang milenial.

Akhirnya, saya selaku Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta, mengucapkan terima kasih dan selamat atas tersusunnya karya ini. Semoga karya ini menjadi karya yang bermanfaat dan dapat menginspirasi tata kelola Monumen, Museum dan Galery yang ada di tanah air.

Surakarta, Oktober 2021
Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta

Widodo Hastjarjo

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Prakata	iii
Sambutan Kepala Monumen Pers Nasional	vii
Daftar Isi	xi
BAB 1 Segi Sejarah Keberdirian Monumen Pers Nasional.....	1
1.1 Surakarta dan Perjuangan Pers Nasional	1
1.2 Peran Mangkunegaran.....	4
1.3 Berdirinya Monumen Pers Nasional.....	8
1.4 Monumen Pers Nasional dan Kementerian Penerangan.....	10
1.5 Monumen Pers Nasional dan IKP Kominfo RI...	13
BAB 2 Melihat Layanan dan Artefak Monunmen Pers Nasional.....	18
2.1 Situasi dan Tantangan	
2.2 Jenis Layanan Publik Monumen Pers Nasional.....	18
2.3 Artefak-Artefak Pers Monumen Pers Nasional.....	23
2.4 Pelayanan Berbasis Edutainmen	24
2.5 Tata Kelola Pelayanan	

	27
BAB 3 Revitalisasi Monumen Pers Nasional...	33
3.1 Penataan Ulang Desain Ruang.....	33
3.2 Diorama-Diorama Ruangan.....	42
3.3 Tata Kelola Perawatan dan Koleksi- Koleksi.....	47
BAB 4 Digitalisasi Monumen Pers Nasional...	49
4.1 Digitalisasi Dokumen.....	49
4.2 Digitalisasi Narasi Segi Sejarah Monumen Pers Nasional.....	57
4.3 Pengelolaan Media Sosial.....	60
4.4 Tata Kelola Administrasi Digital	62
BAB 5 Penutup	63
Daftar Pustaka	64

BAB 1

SEJARAH KEBERDIRIAN MONUMEN PERS NASIONAL

1.1 Surakarta dan Perjuangan Pers Nasional

Kota Solo sejak dulu telah menjadi persilangan sejarah perjuangan kemerdekaan dan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi. Sebab Solo merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, jauh sebelum pemerintah Kolonial Belanda bercokol.

Keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta selama perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengambil peran penting dan signifikan yang tidak dapat diabaikan. Banyak tokoh Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran Surakarta juga menjadi tokoh perjuangan Kemerdekaan.

Seperti KRT Radjiman Wedoningrat dan KRMT Wongsonegoro adalah tokoh-tokoh yang menjadi anggota BPUPKI. Keduanya berasal dari kerabat Keraton Surakarta. Bukan hanya dua tokoh, tetapi dua tokoh tersebut merupakan contoh yang menunjukkan betapa pentingnya posisi keraton baik Kasunanan atau pun Mangkunegaran Surakarta pada waktu itu.

Termasuk di dalamnya adalah jejak-jejak perjuangan pers dan penerbitan, tidak dapat dilepaskan dari peran Keraton yang ada di Surakarta. Dengan demikian Solo menjadi barometer perjuangan pada saat itu.

Nama Solo sendiri berasal dari kata Sala, sebuah nama Desa yang oleh Raja Pakubuwono II dijadikan pusat Kerajaan Mataram

yang baru. Pada masa perjuangan kemerdekaan, di kota Solo ini berdiri organisasi-organisasi berbasis keagamaan seperti Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam.

Pada tahun 1907 terbit Medan Prijaji di Bandung, dan kejadian ini dipandang sebagai tonggak pers nasional, karena didirikan pertama kali oleh seorang pribumi yang bernama Tirta Adi Suryo, yang memicu daerah-daerah lain untuk turut menerbitkan pers. Demikian pula kota Solo mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan pers perjuangan.

Misalnya, Darmo Kondo sebuah penerbitan majalah berdiri yang diinisiasi oleh seorang Ketua Boedi Oetama Cabang Solo. Contoh yang lain, Serikat Islam Cabang Surakarta menerbitkan Sarotama dibawah pimpinan Redaksi Raden Ngabei Koornio.

Dua tahun setelah terbitnya Sarotama, tepatnya pada tahun 1915, di kota Solo berdiri pula penerbitan Medan Muslimin yang dinahkodai Haji Misbach dan M Sastrosiswojo. Fenomena dan karya-karya jurnalistik Haji Misbach hingga saat ini dipandang sangat fenomenal karena menunjukkan jurnalistik yang menggelorakan perjuangan yang revolusioner dan progresif. Tulisan-tulisan Haji Misbach sampai hari ini menginspirasi karena coraknya yang revolusioner tadi.

Kota Solo juga memiliki persinggungan dengan lahirnya Radio Penyiaran. Peran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara VII sangat besar atas berdirinya Radio Penyiaran. Atas inisiatif Pangeran Mangkunegara VII, Sarsito Mangkukusuma mewujudkan berdirinya Solosche Radio Vereeniging. Tepatnya pada tahun 1933.

Berdirinya Solosche Radio Vereeniging ini dapat dikatakan sebagai radio publik pertama yang dioperasikan pribumi Indonesia. Lagi-lagi, hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran Keraton.

Gagasan Pangeran Mangkunegara VII juga mencakup ada dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat, yakni semacam tempat dan balai pertemuan serta perkumpulan bagi masyarakat. Balai dan tempat ini dinamakan Societet Sasana Soeka.

Dari sisi arsitektur, bangunan ini dirancang oleh Mas Aboekassan Atmodirono yang memperlihatkan adanya perpaduan antara bangunan oriental modern dengan bangunan candi. Bangunan inilah yang kemudian kita, sebagai Bangunan Monumen Pers Nasional.

Apa yang dilakukan Pangeran Mangkunegara VII dapat dikatakan cemerlang. Ruang publik merupakan lokasi sosial di mana setiap orang dapat berkumpul dan bertemu untuk memperbincangkan topik-topik sosial di seputar kehidupan mereka. Tentu bagi kepentingan kekuasaan, ruang publik dapat dipakai untuk mendengar keluh kesah warga terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada. Gagasan ini telah dipikirkan Pangeran Mangkunegara VII di era itu.

Gagasan tentang ruang publik, sejalan dengan gagasan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu gagasan dan perwujudan balai pertemuan semacam itu merupakan pemikiran brilian.

Gagasan itu jelas, sejalan dengan prinsip dan peran pers pula, yakni adanya distribusi dan pertukaran informasi. Sedangkan pertukaran informasi itu sendiri adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan. Di masa itu, pengetahuan dan wawasan sebagai sesuatu yang berharga di tengah baca tulis masyarakat masih sangat minim dan terbatas.

Selain beberapa hal tersebut yang menjadikan kota Solo terasa istimewa, juga menyangkut sejarah perusahaan rekaman musik (label) di Indonesia. Adalah Lokananta merupakan perusahaan

rekaman musik (label) pertama di Indonesia yang dimiliki negara, pun berdiri di kota Solo.

Perusahaan ini berdiri pada tahun 1957 atas inisiatif R Maladi yang kala itu menjadi Menteri Penerangan di Masa Pemerintahan Presiden Soekarno. Banyak merdunya lagu yang diperdengarkan di radio-radio dan tape recorder pada dua dekade pada tahun 1960an karena produksi perusahaan ini.

Pada tahun 1934, Gedung Monumen Pers Nasional pernah digunakan untuk Kongres Bumiputera. Sebuah forum di mana orisinalitas pemikiran tentang Ke-Indonesia-aaan dan nasib kebangsaan mulai terpikirkan. Momen itu juga membangkitkan kesadaran pribumi tentang hakikat kebangsaaannya.

Momentum penting lain bahwa Monumen Pers Nasional ini memiliki keterjalinan dengan lahirnya asosiasi profesi wartawan. Pada tanggal 9 Februari 1946, di Kota Solo, tepatnya di Monumen Pers ini, terbentuklah Persatuan Wartawan Indonesia. Banyak tokoh insan pers pernah singgah di sini antara lain BM Diah, Rosihan Anwar, S Tahsin, hingga para wartawan generasi selanjutnya seperti Harmoko. Sebagai organisasi profesi, PWI yang semestinya ada di tingkat Provinsi, tetapi sebagai keistimewaannya, PWI memiliki cabang di Kota Solo.

Para pejabat pemerintah dari waktu ke waktu juga memberi perhatian kepadanya. Dari Walikota, Gubernur, Menteri, hingga Presiden. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang ke-32 tepatnya pada tanggal 9 Februari 1978, Presiden Soeharto pernah menyatakan arti penting kebebasan dan resiko kebebasan, jika kebebasan untuk kebebasan itu sendiri. Pers semestinya diarahkan sebagai pers yang bertanggung jawab khususnya terhadap kepentingan bangsa dan negara. Pidato ini disampaikan Presiden Soeharto juga di Monumen Pers Nasional Surakarta.

Lintasan sejarah demikian cukup membuktikan bahwa kota Solo dan Monumen Pers Nasional yang ada di kota ini, merupakan bagian dari tonggak-tonggak perjuangan bangsa khususnya bagi perjuangan pers nasional. Karena itu, kontekstualisasi terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi di kota Solo, diperlukan untuk memberikan landasan atau semacam “common ground” dalam melihat dan memahami keberadaan Monumen Pers Nasional.

1.2 Peran Keraton Mangkunegaran

Untuk diketahui, keberadaan keraton di kota Solo merupakan ikon penting yang tidak bisa diabaikan. Setidaknya orang Solo mengenal beberapa keraton, yakni Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Keraton Kasunanan didirikan oleh Sunan Pakubuwono II di desa Solo yang kemudian sebagai pusat kerajaan. Kerajaan ini didirikan sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur oleh terpicunya geger Pecinan yang dilakukan Raden Mas Said dan dibantu oleh orang-orang turunan Tiongha.

Pada masa raja Sunan Pakubuwono III, Kerajaan Mataram ini kembali bergolak secara internal tetapi juga akibat adanya intervensi kolonial Belanda. Adanya perlawanan Pangeran Mangkubumi, menyebabkan keraton Surakarta ini harus dibagi menjadi dua, yakni Kesunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta melalui perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Giyanti.

Sementara Raden Mas Said yang juga dikenal sebagai Pangeran Sember Nyawa mendirikan Keraton tersendiri yang dikenal dengan Keraton Mangkunegaran. Pendiri Keraton ini dikenal sebagai pejuang gigih yang melakukan perlawanan kolonial di tanah Jawa setidaknya untuk wilayah Solo dan sekitarnya.

Raden Mas Said adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegaran atau merupakan cucu dari Sinuhun Pakubuwono I. Corak kehidupan Raden Mas Said yang dekat dengan rakyat dan kehidupan luar istana, menyadari bahwa bangsanya sedang mengalami penjajahan dan menyadari bahwa pihak keraton selama ini bersekutu dengan kolonial Belanda. Itulah kenapa, Raden Mas Said melakukan perlawanan terhadap keraton Kartosura yang dibantu oleh orang-orang Tiongha, yang dikenal dengan geger Pecinan.

Perlawanan ini kemudian berhasil menghancurkan keraton Kartasura dan membuat Sinuhun Pakubowono II melarikan diri sampai ke Ponorogo. Namun kemudian, Sinuhun Pakubuwono II ini berhasil kembali mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mendirikan kembali Keraton Mataran di desa Sala.

Heroisme Pangeran Sember Nyawa ini sangat fenomenal. Seperti pula perlawanan Heroisme dari Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Sember Nyawa ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut:

- a. Pada pertempuran dengan serdadu VOC di sebelah selatan Rembang, pasukan Pangeran Sember Nyawa dapat memukul mundur VOC dan berhasil membunuh 600 prajurit VOC
- b. Di dalam pertempuran itu, Pangeran Sember Nyawa dapat membunuh Kapten Van der Pol yang saat itu sebagai Komandan Pertempuran VOC
- c. Pangeran Sember Nyawa pernah berhasil menguasai benteng Belanda Vrendenberg yang ada di Yogyakarta. Tindakan menguasai benteng ini dipicu oleh kemarahannya atas tindakan tantara VOC yang melakukan penjarahan dan pembakaran rumah penduduk

- d. Pangeran Sember Nyawa harus menghadapi tekanan berat dari tiga kekuatan sekaligus, yakni mereka yang berada di pihak Sinuhun Pakubuwono III dan Hamengku Buwono I serta VOC sekaligus. Meskipun demikian, Pangeran Sember Nyawa tidak pernah gentar
- e. Pangeran Sember Nyawa melakukan perlawanan dengan sistem gerilya

Setelah 16 tahun bergerilya, yang merupakan waktu yang tidak pendek, pada akhirnya, Pangeran Sember Nyawa, tepatnya pada tahun 1756, pasukannya masuk kembali ke Surakarta. Kembalinya Pangeran Sember Nyawa kembali ke Surakarta ini diapresiasi oleh Sinuhun Pakubuwono III dan Sinuhun telah menyiapkan sebuah wilayah yang diperuntukkan bagi Pangeran Sember Nyawa yang dikenal dengan Puro Mangkunegaran. Tetapi hal ini ditolak. Pangeran Sember Nyawa lebih memilih wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Kauman Mangkunegaran.

Pada akhirnya, kerajaan Mataram Surakarta ini pun harus kembali berbagi. Melalui Perjanjian Salatiga, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1757, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yakni Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah kekuasaan Dinasti Mangkunegaran ini mencakup wilayah Surakarta bagian Timur, yang sekarang adalah Kecamatan Banjarsari, seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, Sebagian Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogori. Pangeran Sember Nyawa sendiri bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkungan I. Hanya saja, otoritas Keraton Mangkunegaran ini tidak setara seperti Keraton Kasunanan atau pun Kasultanan Yogyakarta.

Seperti yang kita saksikan sekarang, eksistensi keraton ini dapat kita lihat, yakni Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton

Mangkunegaran dan Keraton Kartasura. Aspek historis semacam ini jauh sebelum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdiri. Namun kita melihat bibit-bibit perlawanan terhadap keberadaan kolonial Belanda yang dipandang merugikan dan menindas bangsa Indonesia menjadi penciri akan muncul perjuangan secara nasional.(buku "Sejarah & Warisan Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said"-Aswab Nanda Pratama, Mengenal Dinasti Mangkunegaran-<https://regional.kompas.com>, 4 Agustus 2021)

Sekelumit sejarah Keraton Mangkunegaran ini patut untuk dicatat dalam paparan ini, mengingat peran dan kedudukannya, memiliki keterjalinan dengan keberadaan Monumen Pers Nasional itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan bahwa keberadaan Monumen Pers Nasional itu dulunya adalah balai perkumpulan dan pertemuan yang dibangun oleh Keraton Mangkunegaran.

Dengan latar belakang perjuangan dan berdirinya Keraton Mangkunegaran, menjadi sangat logis, bila posisi Keraton Mangkunegaran lebih dekat pada perjuangan kebangsaan dan kerakyatan. Sejarah panjang perlawanan Pangeran Samber Nyawa sedemikian itu, menjadi selaras dengan tujuan rakyat secara keseluruhan terhadap kemerdekaan dan keadilan. Semua itu menjadi prinsip-prinsip dalam kita bernegara, yakni sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bangunan yang sekarang dikenal sebagai Monumen Pers Nasional itu, dulunya dikenal sebagai Societet Mangkunegaran. Bangunan itu didirikan atas inisiatif Pangeran Mangkunegara VII pada tahun 1918 untuk balai perkumpulan dan pertemuan.

Selain Keraton Mangkunegaran telah mewarnai jalannya perjuangan bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, tokoh-tokoh nasional yang berasal dari kerabat Keraton Mangkunegaran cukup banyak. Salah satu diantaranya adalah Siti Hartinah yang dikenal dengan Bu Tien

Soeharto adalah masih merupakan keturunan trah Mangkunegaran. Demikian pula Erlangga Hartarto ternyata juga masih merupakan keturunan trah Mangkunegaran.

1.3 Berdirinya Monumen Pers Nasional

Monumen Pers Nasional adalah Monumen dan sekaligus Museum tentang Pers Nasional. Tidak saja, ia bernilai sejarah, tetapi juga di dalamnya tersimpan sejumlah arkeologi komunikasi khususnya perjalanan dan perjuangan pers nasional dari jaman ke jaman. Ada sisi historis, tetapi sekaligus di dalamnya ada nilai edukasi serta identitas bagi Pers Nasional yang direpresentasikan keberadaan Monumen Pers Nasional Surakarta.

Lokasi Monumen Pers Nasional ini ada di Kota Solo, tepatnya di Jalan Gajah Mada No 59 Timuran Kecamatan Banjarsari, Surakarta 57132. Bila ditilik dari lokasinya, ini membuktikan bahwa tanah di mana Monumen Pers Nasional ini berdiri berada dalam tanah wilayah Keraton Mangkunegaran.

Jika kita berkunjung ke sana, kita akan mendapatkan diorama-diorama yang memperlihatkan lintasan sejarah keberadaan bangunan dan berdirinya Monumen Pers Nasional. Ada diorama yang memperlihatkan tokoh-tokoh pers Nasional, artefak yang berkaitan dengan dunia jurnalistik dan pers, dan arsip-arsip penerbitan dari jaman ke jaman.

Nama Monumen Pers Nasional sendiri baru ditetapkan pada tahun 1977. Ini dilakukan setelah adanya usulan dari para wartawan seperti BM Diah, Rosihan Anwar dan S Tahsin untuk mendirikan Yayasan yang menaungi keberadaan Monumen Pers. Usulan itu terlontar bertepatan dengan 10 tahun lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia. Untuk diketahui bahwa organisasi

profesi wartawan PWI lahir pada tanggal 9 Februari 1946 di Monumen Pers ini dan kemudian hari lahirnya organisasi profesi wartawan ini diperingati sebagai Hari Pers Nasional.

Secara fungsional dan tergantung pada tingkat kedarutan situasi yang pernah dihadapi, Gedung Monumen Pers Nasional ini, pernah digunakan untuk Markas Palang Merah Indonesia. Sebelumnya pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini dipakai sebagai tempat klinik perawatan tantara Jepang. Hingga kemudian bangunan ini ditasbihkan sebagai Monumen Pers Nasional. Di awal niatannya, Pangeran Mangkunegara VII bermaksud mendirikan Gedung itu, sebagai balai pertemuan dan perkumpulan.

Yayasan yang menaungi Museum Pers Nasional ini pada akhirnya berhasil diwujudkan pada tanggal 22 Mei 1956. Di dalam Museum Pers Nasional, terdapat koleksi-koleksi penerbitan, artefak-artefak jurnaistik dan pers, yang berasal dari sumbangan para tokoh pers. Salah satu diantaranya adalah sumbangan dari Sudarjo Tjokrosisworo. Dikemudian hari banyak sumbangan penerbitan dan artefak-artefak lainnya seperti Kamera Foto milik Udin (wartawan Bernas) dan Komala Atmaja. Di samping koleksi-koleksi lain yang dikumpulkan sendiri oleh pengelola dan pengurus Monumen Pers Nasional.

Nama Monumen Pers Nasional sendiri diputuskan baru pada tahun 1973. Padahal sebagai Yayasan yang menaungi Museum Pers Nasional telah berdiri pada tahun 1956-merupakan waktu yang cukup panjang untuk menjadikan Societet Mangkunegaran ini menjadi Monumen Pers Nasional.

Tentu hal ini menyangkut banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sehingga untuk menjadi Monumen Pers Nasional diperlukan tahapan-tahapan yang panjang. Tahapan ini termasuk perluasan bangunan, dari bangunan Induk yang dibangun oleh

Mangkunegaran dan kemudian diperluas sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan lain yang berkembang sesuai dengan situasi sosial, ekonomi dan politik dari jaman kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Republik Indonesia.

1.4 Monumen Pers Nasional dan Pemerintahan

Pers dan pemerintahan jelas berjejalin. Mengacu pada Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dengan peranan semacam itu, jelas peran dan fungsi pers sangat penting bagi penyelenggaraan bernegara. Artinya, keberadaan pers merupakan bagian dari pilar demokrasi. Sebab dikatakan bahwa pers adalah pilar keempat dari demokrasi setelah Lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Pertanyaanya adalah apa relevansinya dengan Monumen Pers Nasional Surakarta? Posisinya adalah sebagai Unit Pelaksana

Teknis di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang bertugas untuk menjaga, merawat dan melestarikan artefak-artefak perjalanan pers di Indonesia.

Banyak hal yang telah ditorehkan dalam perjalanan panjang pers di Indonesia. Piranti kerja jurnalistik, karya-karya jurnalistik sepanjang jaman, penerbitan-penerbitan yang ada, tingkat teknologi yang berhubungan dengan kerja jurnalistik serta ketokohan seseorang dalam bidang jurnalistik dan pers di tanah air semestinya menjadi bagian dan isi yang ada di dalam Monumen Pers Nasional Surakarta.

Menurut catatan yang ditulis Agus Sutanto (Dokumen Monumen Pers) seorang koresponden Buana Minggu di Solo, bercerita tentang rencana bagaimana Gedung Societet menjadi Monumen Pers Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Cetusan ide wartawan Agus Dargosumarto. Pada tahun 1972 Agus Dargosumarto yang kala itu Ketua PWI Cabang Surakarta menyampaikan ide pembangunan monumen pers.
- b. Sejumlah pengurus PWI Cabang Surakarta mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah saat itu Supardjo Rustam saat Gubernur meresmikan Taman Satwataru Jurug agar pembangunan Monumen Pers Nasional segera diwujudkan.
- c. Gubernur Supardjo Rustama merespon dengan memerintahkan Wali Kota Solo Sumari agar segera menyelesaikan peruntukan Gedung Societet dari Palang Merah Indonesia dengan memindahkannya dekat Rumah Sakit Umum Moewardi

- d. Terbentuknya Panitia Pelaksana Pembangunan Monumen Pers di Solo dengan beberapa pengurus PWI Cabang Surakarta duduk dalam kepanitiaan. Kepanitiaan ini kemudian diikuti oleh terbentuknya kepanitiaan pusat yang anggotanya terdiri dari Hamidy (PWI Pusat) sebagai Ketua Panitia, Letkol Daryono (SPS) sebagai Wakil Ketua, Muhammad BA (Kanwil Departemen Penerangan Jawa Tengah) sebagai Sekretaris dan Letkol (AL) Sarlan Adisucipto sebagai bendahara. Ketua PWI Pusat saat itu adalah Harmoko
- e. Dukungan dana pembangunan mengalir dari tiga Lembaga, yakni dari Menteri Penerangan, Yayasan Harapan Kita dan dari APBD Jawa Tengah
- f. Pelaksanaan Pembangunan Monumen Pers Nasional ditetapkan melalui SK Gubernur yang menjadi tanggung jawab Walikota saat itu, yakni Sumari.
- g. Peresmian Gedung Monumen Pers Nasional diresmikan bertepatan dengan HPN ke-32 yang dipusatkan di Kota Sol yang dihadiri Presiden Soeharto.

Michael Foucault (1970) dalam bukunya *The Archeology of Knowledge*, menunjukkan bahwa setiap jaman memiliki narasi dan pengetahuan yang menarik dan distingtif. Arkeologi khususnya arkeologi komunikasi menunjukkan jejak dan rekam pratek-praktek komunikasi di masa lalu. Gambaran dan potret peristiwa masa lalu itu kemudian menjadi sejarah, tersimpan, terdokumentasi dalam perpustakaan-perpustakaan, sanggar-sanggar, monument-monumen dan museum. Potret semacam ini

dapat direpresentasikan terhadap dan atas keberadaan Monumen Pers Nasional

Berkaca dari pemikiran itu, apa yang ada di dalam Monumen Pers Nasional dengan sendirinya adalah cermin bagi perjalanan dan perjuangan bangsa. Rekam jejak komunikasi melalui artefak-artefak komunikasi dalam jurnalistik dan pers nasional dapat menjadi sejarah penting yang dapat ditularkan kepada generasi penerus bangsa berikutnya.

Dari jaman ke jaman atau dari pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, kejadian-kejadian, peristiwa ke peristiwa Sebagian dan terutama hal-hal yang penting menyangkut penyelenggaraan negara dan pemerintahan terekam dalam peliputan media. Karya-karya inilah yang kemudian dirawat dalam Monumen Pers Nasional yang ada di Solo.

Foto 1: Hari Pers Nasional ke 38 di Monumen Pers Bersama Presiden Soeharto



Sumber foto; Monumen Pers Nasional

1.5 Monumen Pers Nasional dan IKP Kominfo RI

Terlepas secara kelembagaan dan kepemilikannya, yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan, saat ini (baca:tahun 2021) Monumen Pers Nasional Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Kejelasan posisi Monumen Pers Nasional secara kelembagaan ini dapat diketahui berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 06/Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional. Monumen Pers Nasional dipimpin seorang Kepala Monumen Pers Nasional

Selain Monumen Pers Nasional yang ada di Solo, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik juga mengelola Museum Penerangan berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Kedudukan Museum Penerangan setara dengan Monumen Pers Nasional. Hal yang membedakan adalah lokus tugas dan peran yang dijalankannya. Museum Penerangan menitikberatkan pada pelestarian terhadap benda-benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang informasi. Museum Penerangan juga dipimpin seorang Kepala Museum.

Secara organisatoris, susunan organisasi Monumen Pers Nasional terdiri dari Seksi Pelayanan Informasi, Seksi Konservasi dan Preservasi, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara operasional, mereka yang bekerja di dalamnya ada yang berstatus sebagai ASN (PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika RI), tetapi ada pula yang berstatus sebagai pekerja kontrak dan atau Honorer.

Dari segi program kerja dan anggaran, Monumen Pers Nasional menginduk pada apa yang menjadi arah kebijakan dan program Direktur Jenderal Komunikasi dan Informatika RI. Selain berbasis pelayanan, reservasi dan preservasi terhadap artefak-artefak komunikasi khususnya dalam bidang pers dan jurnalistik,

Monumen Pers Nasional tengah mengembangkan diri sebagai ruang publik yang mengintegrasikan antara unsur Pendidikan dan unsur hiburan.

Foto 2a. Pidato Presiden Soeharto
HPN 32 di Monumen Pers Nasional, 9 Februari 1978



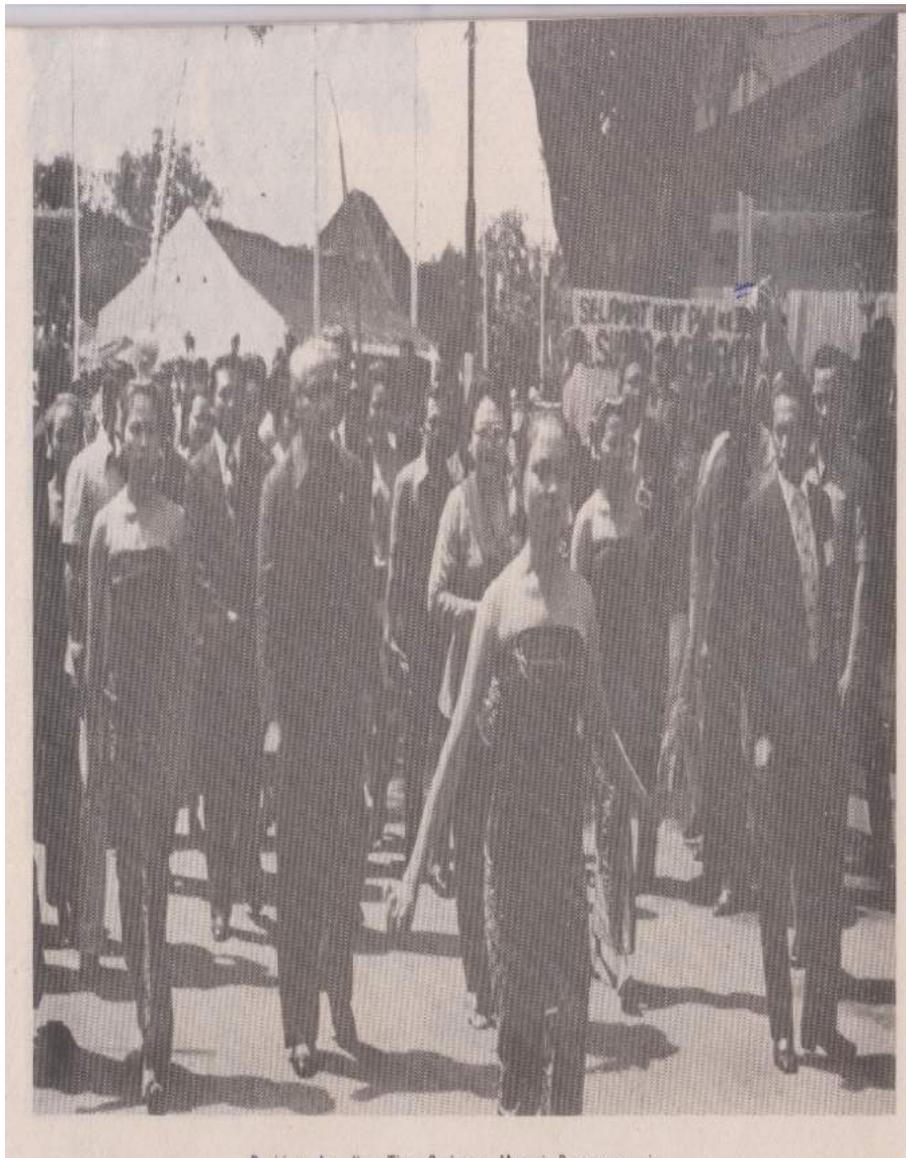
Sumber Foto: Monumen Pers Nasional

**Foto 2b. Gunungan dalam Pewayangan
Tanda Simbolis oleh Bu Tien Soeharto dalam HPN ke 38
di Monumen Pers Nasioanl**



Sumber Foto: Monumen Pers Nasional

**Foto 2c Peresmian Monumen Pers
Disambut dengan Tari Gamyong dan Maesa Lawung, 9 Februari 1978**



Sumber foto: Monumen Pers Nasional

BAB 2

LAYANAN DAN ARTEFAK MONUMEN PERS NASIONAL

2.1 Situasi dan Tantangan

Sebagai Monumen dan sekaligus Museum, tantangannya adalah: Pertama, bagaimana mengelola arkelogi-arkeologi komunikasi yang berwujud rekam jejak pers di Indonesia dari jaman ke jaman. Di Monumen Pers Nasional ini, tersimpan dan terdokumentasi, koran-koran, majalah-majalah, rekaman-rekaman dari Jaman Hindia Belanda sampai di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Oleh karena, diperlukan sistem dan tata Kelola yang professional dan handal.

Masalah kedua yakni bagaimana menjadikan Monumen Pers Nasional ini menarik untuk dikunjungi. Tantangan kedua ini adalah bagaimana Monumen Pers Nasional merupakan tempat (ruang publik) yang menarik yang memadukan antara unsur sejarah, edukasi dan entertain yang bisa digunakan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure time*. Kesan bahwa Monumen Pers Nasional sebagai tempat kuno, lusuh, dan suram, mesti diubah dan dibranding menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi ruang publik yang menarik, sumber referensi tentang pers dan dikenal secara luas di masyarakat.

Monumen Pers Nasional telah memiliki lintasan sejarah yang penting, yang keberadaannya merupakan persinggahan politik, pers, budaya dan identitas kultural karena ada di Kota Solo. Persatuan Wartawan Indonesia terlahir di Solo dan terkait tempat dengan Monumen Pers Nasional. Perusahaan rekaman

pertama kali, lahir di Solo. Demikian juga penerbitan pers pertama juga lahir di Solo.

Di Monumen Pers Nasional disajikan perjalanan historis pers nasional, artefak radio siaran pertama, jenis-jenis mesin ketik, radio transistor dari jaman ke jaman. Dengan demikian, secara fisik, sebagai ruang publik, tantangannya adalah bagaimana Monumen Pers Nasional menjadi referensi utama tentang pers baik secara nasional bahkan internasional.

2.2 Jenis Layanan Publik Monumen Pers Nasional

Citra museum dan monumen mengesankan tempat yang lusuh, tua dan ketinggalan jaman. Dalam penelitiannya, Milena Gnjatovic (2014) memaparkan bahwa pentingnya branding bagi museum atau monumen agar menarik minat dan kunjungan publik kepadanya. Bahkan dijelaskan, adanya kecenderungan museum dan monumen ditutup dan benar-benar sepi dari pengunjung. Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa harus ada cara pandang yang mesti berubah dalam mengelola museum dan monument, terkait dengan perubahan cara pandang publik dan gaya hidupnya.

Eksistensi Museum dan Monumen itu sendiri memiliki nilai, bersifat historis, mencakup segi Pendidikan, refleksi jaman dan merupakan lokasi publik. Hubungan antara museum dan publik menjadi salah satu kunci dalam cara-cara masyarakat menghargai keberadaan museum.

Penelitian yang dilakukan Basuki Agus Suparno dan Nia Kurnia Arofah misalnya (2019) tentang Museum Sangiran, memperlihatkan sejumlah kondisi penerimaan pada satu sisi, dan sikap-sikap skeptis lain terhadap keberadaannya. Baik secara ekonomi, sebagai ruang publik dan Pendidikan, tidak sepenuhnya diterima secara utuh. Artinya, relasi antara komunitas dan

keberadaan museum mesti dijalin komunikasi yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Dalam penelitian lanjutan yang dilakukan keduanya, yang mengacu tata Kelola dan sejumlah regulasi yang mengikat tentang keberadaan Museum, ada sejumlah hambatan komunikasi yang terjadi dari para stakeholder. Dalam penelitian itu Suparno dan Arofah (2021) menunjukkan adanya ketegangan hubungan antara apa yang diharapkan publik dengan kebijakan regulative terhadap museum.

Pemikiran-pemikiran itu ditunjukkan untuk memperlihatkan bahwa eksistensi Museum dan Monumen agar menjadi menarik dan dikunjungi, ditopang oleh sejumlah keadaan dan persepsi. Demikian pula, terhadap keberadaan Monumen Pers Nasional yang ada di kota Solo. Kondisi perseptual objektif terhadap Monumen Pers Nasional mesti digali, pada satu sisi, sedangkan di sisi lain, bagaimana Monumen Pers Nasional sendiri mempresentasikan diri, sehingga mendorong perubahan positif terhadap keberadaan Monumen Pers Nasional yang terus berbenah dan menuju tata layanan yang lebih terdigitalisasi.

Saat ini, Monumen Pers Nasional tengah berbenah, dengan melakukan revitalisasi desain ruang, dan peluang untuk melakukan transformasi digital terhadap artefak-artefak komunikasi yang ada di dalamnya. Dari sisi historis, Monumen Pers Nasional memiliki nilai karena berkaitan dengan perjalanan dan perjuangan pers nasional Indonesia.

Michael Foucoult (1970) dalam bukunya *The Archeology of Knowledge*, menunjukkan bahwa setiap jaman memiliki narasi dan pengetahuan yang menarik dan distingtif. Arkeologi khususnya arkeologi komunikasi menunjukkan jejak dan rekam pratek-praktek komunikasi di masa lalu. Gambaran dan potret peristiwa masa lalu itu kemudian menjadi sejarah, tersimpan,

terdokumentasi dalam perpustakaan-perpustakaan, sanggar-sanggar, monument-monumen dan museum. Potret semacam ini dapat direpresentasikan terhadap dan atas keberadaan Monumen Pers.

Tantangannya kemudian, citra Monumen dan Museum dihadapkan pada selera, gaya hidup, persepsi publik, dan pengelolaannya. Apalagi di masa Pandemi, kunjungan dan perhatian publik terhadap monument dan museum pers nasional mengalami penurunan (Data Monumen Pers, 2020). Target pencapaian kunjungan juga tidak terpenuhi. Gagasannya kemudian muncul pemikiran dan mendorong kebijakan tentang transformasi digital terhadap monumen pers.

Secara konseptual layanan Museum dan atau Monumen secara umum termasuk Monumen Pers Nasional ini, terkait dengan tipologinya itu sendiri. Berdasarkan tipologinya itu, maka kita mengenal:

- a. Museum atau Monumen yang layanannya berbasis pada ensiklopedia.
- b. Museum atau Monumen yang dimaksudkan sebagai identitas nasional
- c. Museum atau Monumen yang mengkhususkan pada subjek spesialis tertentu
- d. Museum atau Monumen yang ditujukan untuk kepentingan konsumsi tertentu

Dengan kategorisasi semacam itu, sebaran Museum dan atau Monumen di Indonesia cukup banyak dan beragam. Misalnya Monas (Monumen Nasional) didirikan untuk menunjukkan identitas nasional. Museum Sangiran merupakan museum yang sangat spesifik tentang arkeologi dan sejarah manusia kuno yang berhubungan dengan proses evolusi manusia. Museum Penerangan memfokuskan pada benda-benda sejarah dan ilmiah di bidang

komunikasi. Monumen Pers Nasional merupakan monument yang mengelola artefak-artefak komunikasi khususnya dalam bidang pers dan jurnalistik.

Secara otomatis posisi monument atau museum semacam itu berimplikasi pada sumber-sumber koleksi, perawatan dan pemeliharannya. Museum atau monument yang mengkhususnya pada museum ensiklopedia tentu berbeda dengan monument atau museum yang mengelola benda-benda arkeologi tulang belulang manusia dan hewan pada masa lalu. Demikian pula pengelolaan dan perawatannya akan berbeda dengan Monumen Pers Nasional.

Dari sisi layanan, Monumen Pers Nasional melayani:

- a. Papan Bacaan Koran Masyarakat dengan dua sisi (selatan Surat Kabar Nasional – Kompas, Repulika, MI, Jawa Pos dan Jakarta- Headlinenya semua) yang utara Media Lokal yang terbit Solo, Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Koran Suara Merdeka, Kedaulatan dan Solo Pos, Radar Solo lengkap halaman belakangnya)- Setiap Jam 05 ditempel dan copot untuk keesokan jam 22,00 setiap harinya
- b. Layanan Museum sendiri menampilkan:
 - Artefak produk pers seperti Kamaranya Udin (wartawan Bernas, Plat Cetak Pertama Koran Kedaultan Rakyat,
 - Jenis-jenis mesin dari jaman ke jaman,
 - Koran edisi tertua 1820 disajikan display dan narasi
 - Prasasti tentang Sejarah Monumen pers tahun 1978,
 - Radio Kuno
 - Artefak yang menjadi icon di Monumen Pers sebagai Meseum adalah Radio Kambing.
 - Simulasi penyajian Radio Kambing melalui tap menggunakan aplikasi augmented reality.
- c. Layanan Perpustakaan yang pengunjung bisa membaca maupun meminjam buku secara gratis. Layanan dibuka dari

jam 09-15. Buku-bukunya sejarah, filsafat, komunikasi, IT, Pers/Jurnalistik, budaya, sosial, ekonomi, sastra, IT, Ensiklopedia

- d. E-Paper-merupakan layanan di mana pengunjung bisa membaca surat kabar secara digital baik yang kuno atau yang terkini sudah terdigitalkan. Jumlah koran yang sudah didigitalkan sebanyak 190 ribu koran dan jumlah koran yang belum terdigitalkan berjumlah 180 koran. Sampai saat ini (baca: Agustus 2021) proses pengubahan dari dokumen cetak ke dalam bentuk e-paper masih terus berlangsung. Ada banyak pertimbangan kenapa upaya ini terus dilakukan. Salah satunya adalah karena usia dokumen.

2.2 Artefak-Artefak Pers Monumen Pers Nasional

Ketika pembicaraan pengelolaan museum atau monumen tak urung, pemahaman tentang pentingnya peran koleksi dan kegunaan koleksi yang ada di Museum atau Monumen menjadi urgen. Proses-proses pengumpulan artefak ditentukan pula oleh tipologi monument atau museum yang dikelola. Sebagai gambaran singkat, proses-proses ini wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika Museum atau Monumen itu berkaitan dengan Museum atau Monumen Ensiklopedia maka pengumpulan artefak dan benda-benda koleksinya menyangkut pengetahuan dan data-data ilmiah. Hasil-hasil penelitian utama dan yang merupakan tonggak bagi lahirnya ilmu dan pengetahuan menjadi koleksi utama di dalamnya. Kekuatan dari monument dan museum semacam ini pada riset-riset utama dan fenomenal yang telah melahirkan ilmu pengetahuan
- b. Jika Museum atau Monumen itu berkaitan dengan identitas nasional, maka proses-proses pengumpulan artefak-artefaknya berkaitan dengan sejarah perjuangan, peristiwa-

peristiwa heroik terkait dengan nation building atau semisalnya

- c. Jika Museum atau Monumen tersebut secara spesifik merupakan subjek tertentu seperti halnya Museum Sangiran dan Monumen Pers Nasional, maka proses pengumpulan artefaknya terkait langsung dengan subjek spesifik tersebut. Misalnya artefak tulang-tulang manusia dan hewan untuk melihat evolusi manusia. Atau jika hal ini mengacu pada Monumen Pers Nasional maka proses pengumpulan itu menyangkut artefak-artefak komunikasi khususnya dalam bidang pers dan jurnalistik

Dari tipologi itu jelas, Monumen Pers Nasional dapat dikategorikan sebagai Museum atau Monumen yang memfokuskan pada subjek yang spesifik, yakni artefak-artefak komunikasi khususnya dalam bidang Jurnalistik dan Pers. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa layanan-layanan yang diberikan mencakup koran-koran, majalah-majalah, benda-benda bersejarah yang terkait dengan pers dan layanan perpustakaan sebagai penunjang. Perpustakaan sendiri meskipun buku-buku yang tersedia cukup variative, tetapi sebagian besarnya terkait dengan pers atau jurnalistik.

2.3 Pelayanan Berbasis Edutainment

Inspirasi pelayanan Monumen Pers Nasional berbasis Edutainment dimaksudkan agar keberadaannya menjadi tempat belajar bagi publik khususnya yang berkaitan dengan praktek-praktek jurnalistik dan sejarah jurnalistik itu sendiri. Di sisi lain, tempat belajar itu sendiri mampu melahirkan kegembiraan dan kesenangan tertentu. Seperti itulah arah kebijakan yang seharusnya kemudian dikembangkan secara mendalam.

Dengan adanya ratusan ribu koleksi koran-koran, majalah-majalah, perpustakaan dan papan baca koran yang terbit setiap harinya, ruang-ruang baca, ruang-ruang perpustakaan, Monumen Pers Nasional memiliki modal menuju Monumen yang bersifat edutainment.

Ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika Monumen Pers Nasional ingin melakukan pelayanan kepada publik berbasis edutainment. *Pertama*, Monumen Pers Nasional harus dikenal sebagai tempat yang menyediakan bahan-bahan, dokumen-dokumen, artefak-artefak dan sejarah pers nasional. Lambat laun, Monumen Pers Nasional secara bersamaan dikenal sebagai Pusat Studi Pers Nasional. Karena itu, *re-branding* terhadap keberadaan Monumen Pers Nasional mendesak untuk dilakukan. Monumen Pers Nasional "*Reborn*" adalah contoh usaha-usaha yang telah dan pernah dilakukan dalam melakukan *rebranding*. Namun sejauh ini, posisi Monumen Pers Nasional ini belum benar-benar menjadi *center of excellence* bagi kajian pers dan jurnalistik nasional.

Kedua, Monumen Pers Nasional merupakan tempat yang terbuka dan menerima dari kalangan dan segmen masyarakat apa pun. Keterbukaan ini mencakup keterbukaan untuk digunakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pers dan keterbukaan untuk dikunjungi bagi akses data dan dokumen yang menjadi koleksi Monumen Pers Nasional. Basis pelayanan ini tetap bertumpu pada koleksi museum yang dimiliki Monumen Pers. Antara kunjungan publik dan Monumen Pers Nasional diikat oleh kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh Monumen Pers Nasional tersebut.

Ketiga, sarana dan prasarana penunjang. Kebutuhan-kebutuhan sekunder selain kepentingan utama kenapa seseorang berkunjung ke Monumen Pers Nasional perlu dilakukan. Kebutuhan ini antara lain adanya koneksi jaringan dengan internet, area atau lahan parkir yang nyaman, ruang yang fresh dan sejuk, tempat

ibadah, toilet yang bersih, ruang pertemuan, ruang seminar, ruang diskusi, dan kebutuhan konsumsi yang terjangkau.

Keempat, interaksi dan keramahan pelayanan. Interaksi dan kedekatan petugas dan pengelola Monumen Pers Nasional dapat menimbulkan kenyamanan secara sosial dan humanisme. Kepekaan dan kedekatan sosial terhadap para pengunjung dapat menumbuhkan kedekatan secara emosional dan psikologis.

Kelima, pengembangan akses data yang dapat dilakukan secara mandiri. Dengan perkataan lain, digitalisasi dokumen menjadi prioritas yang patut dikembangkan ke depannya. Pengerjaan terhadap koleksi yang dimiliki secara terdigitalisasi, masih berproses dan memerlukan pengelolaan berikutnya, terutama menyangkut bagaimana data-data itu ingin disajikan, disimpan dan diakses.

Dengan demikian, desain, tata Kelola dan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk terus melakukan pembenahan. Kesadaran akan pentingnya Museum dan Monumen seperti Monumen Pers Nasional ini penting untuk terus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Anda Becut Marinescue (2018:186) yang mengatakan:

Museums are depositories of memory, promoters of identity, educational and knowledge-acquiring instruments, yet in the meanwhile they are also intellectual enclaves, social exclusion and distinction instruments, promoters of divisions and symbolic legitimisation. This is why museums' role and mission of preservation and education have begun to be debated and criticised in the post-modern period, and the trend is to promote a more inclusive, less elitist museum, self-reflexive and mirroring the community of which it is part of.

Secara gamblang dikatakan bahwa eksistensi Museum atau Monumen adalah sangat penting. Museum adalah deposit memori jaman, dipakai untuk mempromosikan identitas bangsa, budaya-budaya, pengetahuan dan Pendidikan.

2.4 Tata Kelola Monumen Pers Nasional dan Pelayanan

Ketika kita membicarakan tata Kelola Museum dan Monumen, maka pembahasan semacam ini kita diarahkan pada segi-segi utama dalam manajemen museum dan monument. Sebelum paparan ini secara langsung membahas tata Kelola yang ada di dalam Monumen Pers Nasional ini, terlebih dahulu disajikan pemahaman dasar bagaimana tata Kelola museum dan monument secara umum. Setelah itu, dipaparkan tata Kelola Monumen Pers Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Aktivitas yang mencerminkan tata Kelola Monumen atau Museum mencakup:

- a. Tahap Pengkoleksian bagi Benda atau aartefak Museum. Setiap pengelola berkewajiban untuk memikirkan dan melakukan langkah-langkah yang diperuntukkan untuk memperkaya koleksi monument. Langkah ini dapat diperoleh melalui himbauan, sumbangan, atau penelusuran bagi pengayaan koleksi
- b. Tata Kelola yang berkaitan dengan manajemen resiko. Umumnya hal ini menyangkut persoalan yang berkaitan dengan konservasi, masalah lingkungan, penempatan, dan termasuk keamanan serta pengamanannya. Banyak benda-benda yang ada di Museum dan Monumen adalah benda-benda yang sangat rentan dan mudah rusak sehingga diperlukan perawatan, penjagaan terhadap lingkungan dan keamanannya.
- c. Tata Kelola terhadap Ketersediaan. Dalam konteks ini, pengelola perlu malakukan pendokumentasian, kategorisasi, penyusunan katalog hingga digitisasi terhadap benda-benda atau artefak-artefak yang dimilikinya. Dari aspek ini, pengelola perlu melakukan identifikasi dan ketersediaan apa yang ada.

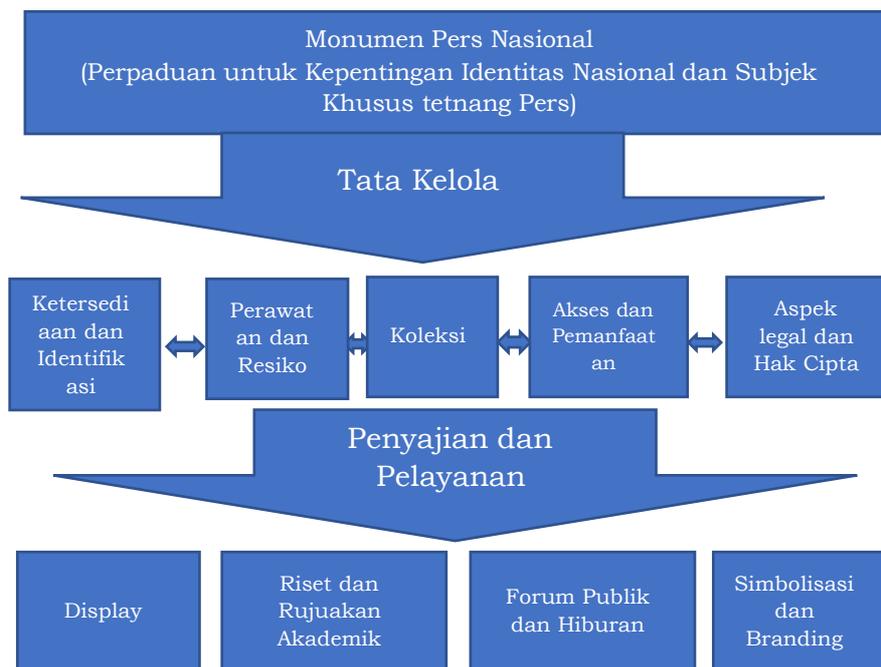
- d. Tata Kelola yang berkaitan dengan akses. Bagaimana jika ada pengunjung yang berkeinginan untuk mengakses. Misalnya ingin melihat, menyaksikan, atau bahkan ingin merasakan secara perseptual dan inderawi. Dalam persoalan ini, museum atau monument dapat mengembangkan secara simulasi, disajikan secara display, atau disaksikan melalui teknologi misalnya melalui sistem kerja augmented reality serta sistem animasi.
- e. Tata Kelola yang berkaitan dengan posisi dan legalitas benda dan artefak yang dimiliki. Semua kepemilikan yang dikelola museum atau monument adalah bendaj-benda yang perolehannya dan hak ciptanya dapat dipertanggungjawabkan. Museum atau monument perlu menyebutkan hak property secara material dan intelektualnya secara jelas. Apakah misalnya menyangkut nama individu atau Lembaga.

Dalam pengelolaan lebih lanjut, pengelola museum atau monument memerlukan pembedaan terhadap koleksi-koleksi yang dimilikinya. Ada 4 pertimbangan yang umumnya menjadi dasar menentukan kegunaan atas koleks-koleksi tersebut:

- a. Display. Tujuan utama penyajian dengan metode display adalah agar publik yang berkunjung memiliki pengalaman langsung saat di Monumen atau di Museum. Tujuan keduanya agar ada sesuatu yang ril dan menarik perhatian pengunjung
- b. Riset dan Referensi. Tujuan utama dengan metode ini adalah bahan-bahan koleksi dapat digunakan sebagai rujukan dan objek itu sendiri. Kajian terhadap objek-objek museum atau monument dapat dikembangkan atas perisitwa masa lalu, konstruksi kembali dan bahan interpetasi serta analisis
- c. Hiburan. Tujuan utama dengan metode hiburan adalah pengunjung mendapat kegembiraan. Misalnya pengunjung langsung dapat mendemonstrasikan dan simulasi di sana.

Sajian dalam bentuk movie yang mengkisahkan bagian-bagian utama dari koleksi juga dipandang sebagai metode dengan pendekatan hiburan

- d. Simbolisme. Metode simbolisme hal yang penting. Banyak hal dari artefak-artefak dapat disajikan dalam bentuk ilustrasi, foto, gambar, began dan warna. Bahkan bentuk bangunan itu sendiri adalah bagian dari metode simbolisme itu sendiri.



Kini tinjauan secara regulatif dan empiris sebagai komparasi akan dipaparkan sebagai berikut. Pertama, penjelasan secara regulatif disajikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 06 /Per/M.Kominfo/ 03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional. Kedua, penjelasan tentang pelaksanaan sejak Peraturan Menteri tersebut diterbitkan dan perkembangan apa yang telah dicapai hingga perlunya upaya Revitalisasi Monumen Pers Nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Monumen Pers Nasional adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Informatika dan

Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang dipimpin oleh seorang Kepala Monumen Pers Nasional. Secara administratif, penyelenggaraan pelayanan dan program yang ada di Monumen Pers Nasional berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Tata Kelola Monumen Pers Nasional ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut, yang dapat dilihat melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Monumen Pers Nasional memiliki tugas melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat tentang artefak-artefak komunikasi khususnya dalam bidang pers nasional yang memiliki nilai sejarah.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Monumen Pers Nasional melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran sebagai pengejawantahan dari tugas pokok Monumen Pers Nasional yakni melakukan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat
3. Terhadap koleksi, benda-benda bernilai sejarah tentang pers dan artefak-artefak komunikasi lainnya di bidang pers, perlu dipelihara, ditatalaksanakan, pengawetan, perlindungan dan perawatannya
4. Monumen Pers Nasional juga melakukan pengelolaan dan pelayanan terhadap perpustakaan Monumen Pers Nasional. Buku-buku yang menjadi koleksi cukup beragam dari buku-buku tentang filsafat, agama, sosial, politik, komunikasi dan pemerintahan.
5. Melaksanakan kerumahtanggaan dan tata usaha administratif sebagaimana lazimnya organisasi birokrasi pemerintah.

Secara organisatoris, Monumen Pers Nasional memiliki struktur organisasi yang mencakup: Seksi Pelayanan Informasi; Seksi Konservasi dan Preservasi; Sub Bagian Tata Usaha dan; Bagian Jabatan Fungsional.

Berdasarkan pada peraturan tersebut, deskripsi kerja dan tanggung jawab pekerjaan telah terperinci sedemikian rupa. Ada prinsip kerja yang diamanatkan di dalam peraturan tersebut, yakni adanya kordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Artinya, setiap bagian per bagian di dalam struktur tersebut, bukan merupakan bidang yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi kesatuan unit yang utuh, yakni sebagai penatalaksana Monumen Pers Nasional di Surakarta.

Di dalam struktur organisasi semacam itu, status kepegawaian mereka pun berbeda-beda. Sebagian mereka adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Sedangkan sebagian yang lain adalah pegawai kontrak/honorer di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang diperlukan untuk membantu penyelenggaraan pelayanan dan perawatan Monumen Pers Nasional.

Perbedaan semacam ini selain harus diterima sebagai fakta, namun yang lebih penting adalah bagaimana amanat dalam peraturan Menteri tersebut yang menegaskan batasan tugas bagi siapa pun yang berada di Monumen Pers Nasional, harus mampu bekerja secara kordinatif, integratif dan sinkron satu terhadap yang lain.

Problem-problem organisasi semacam itu biasanya kerap terjadi ketika terjadi perbedaan status dan pendapatan serta perlakuan terhadap karir seseorang yang bekerja. Dalam situasi semacam ini, maka peran pimpinan dalam hal ini Kepala Monumen Pers Nasional menjadi sentral dan krusial. Peran Kepala Monumen Pers Nasional yang terpenting adalah bagaimana bidang-bidang yang

ada di bawah tanggung jawabnya dapat bekerja secara kordinatif, integratif dan sinkron.

Mereka yang bekerja pada seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberi pelayanan informasi dan penyiapan sarana diseminasi. Mereka yang bekerja di seksi Konservasi dan Preservasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, penatalaksanaan koleksi, pengawetan dan perlindungan benda-benda pers yang memiliki nilai sejarah serta sekaligus melakukan pengelolaan perpustakaanannya.

Sedangkan mereka yang bekerja di seksi Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan dan Kerjasama serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Monumen Pers Nasional.

Adapun mereka yang memiliki jabatan fungsional bekerja sesuai dengan tugas dan jabatannya. Kelompok jabatan fungsional ini dipimpin oleh seorang senior di dalam jabatan itu. Jenjang dan jenisnya diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pegawai yang bekerja di Monumen Pers Nasional saat ini (baca: Agustus 2021) sebanyak 23 pegawai. Dari jumlah itu, 1 Pegawai sebagai Kepala Monumen Pers Nasional (Widodo Hastjaryo, MSi), 1 Pegawai sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sebanyak 8 pegawai memiliki jabatan fungsional teknis dan 13 pegawai memiliki jabatan fungsional umum.

Jabatan fungsional teknis yang ada di Monumen Pers Nasional saat ini terdiri dari Pustakawan Ahli Muda, Pranata Humas Ahli Muda, Pamong Budaya Ahli Muda, Arsiparis Ahli Muda, Pranata Komputer Ahli Muda, Pranata Humas Ahli Pertama dan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan.

Poinnya adalah setelah memahami tata Kelola Museum atau Monumen serta posisi strategisnya, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Monumen Pers Nasional menentukan keberlangsungan dan cara-cara bagaimana koleksi dan artefak komunikasi bidang jurnalistik dan pers dikelola.

BAB 3

REVITALISASI MONUMEN PERS NASIONAL

3.1 Penataan Ulang Monumen Pers Nasional

Sebagaimana dikatakan Kepala Monumen Pers Widodo Hastjaryo (Wawancara, 12 Juli 2021) revitalisasi terhadap Monumen Pers Nasional perlu dilakukan. Alasannya adalah sudah terlalu lama, perwajahan Monumen Pers Nasional hadir dengan penyajian yang lama. Padahal ekspektasi publik mengalami perubahan. Konsep tentang tata Kelola museum dan monument juga mengalami perubahan. Gaya penyajian museum dan monumen yang modern, telah mulai bergeser ke dalam penyajian yang post-modernisme yang memadukan antara seni, riset, budaya, kepentingan professional dan hiburan.

Dalam paparannya, Hastjaryo menjelaskan revitalisasi terhadap Monumen Pers Nasional yang dilakukan adalah menyeluruh. Revitalisasi ini mencakup Revitalisasi Fisik, Revitalisasi Citra Monumen, Revitalisasi Manajemen, Revitalisasi Program, Revitalisasi Jejaring dan Revitalisasi Kebijakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa revitalisasi semacam ini juga mendapatkan momentum ketika keberadaan Monumen Pers Nasional ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Nasional berdasarkan pada Surat Keputusan Penetapan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.57/PW.007/MKP/2010. Usia Monumen Pers Nasional itu sendiri dengan demikian telah lebih dari 100 tahun.

Ide revitalisasi dimulai awal September dan Oktober 2018, setelah Monumen Penerangan pada awal tahun 2018 yang juga merupakan bagian dari UPT Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan revitalisasi fisik. Di dalam masa jabatan baru itulah, ide revitalisasi menyeluruh terhadap Monumen Pers Nasional disusun dan diusulkan Widodo Hastjaryo pada saat itu.

Pertimbangan revitalisasi juga terdorong adanya perubahan dan perkembangan teknologi. Hadirnya generasi milenial menjadi pemicu bagi upaya untuk mendefinisikan kembali keberadaan Monumen Pers Nasional. Mereka pula adalah kelompok sasaran bahkan utama yang diharapkan menjadi pengunjung dan pengguna terhadap berbagai ketersediaan benda-benda sejarah dalam bidang jurnalistik dan pers.

Dari segi fisik, revitalisasi ini mencakup segi-segi ruang, dimensi artistik ruang, warna, desain, dan fasilitas yang menyertainya. Ada arah perubahan yang nyata, telah dimulai 2 tahun lalu (2019) untuk mempercantik baik secara interior maupun eksterior ruang dan bangunan.

Dari sisi interior, ruang-ruang yang digunakan untuk display diperbaharui, pencahayaan diperbaiki, warna-warna yang kusam diganti dan diubah, termasuk tata letak benda-benda yang didemonstrasikan sedemikian rupa.

Pemanfaatan teknologi printing digunakan dan dipadukan dengan penyajian yang mengedepankan narasi dan *story telling*. Pintu depan dan *front office* yang merupakan etalase utama di mana para pegawai dan pranata Humas, untuk pertama kali menyambut tamu yang berkunjung, juga diperbaharui.

Foto 3 Sebelum Revitalisasi



Sumber Foto: Dokumen Monumen Pers Nasional. Pegawai Monumen Pers Nasional sedang menerima Kunjungan Tamu di bagian Front Office. Interior lama.

Ruang yang terlihat di dalam foto tersebut telah mengalami perubahan dalam revitalisasi yang dilakukan Monumen Pers Nasional. Sebelum direvitalisasi, ruang front office Monumen Pers Nasional merupakan ruang yang kurang menarik. Identitas dan simbolisasi yang memperlihatkan bahwa mereka sedang berkunjung ke dalam Monumen Pers Nasional tidak terlihat.

Padahal, begitu pengunjung masuk dari pintu utama Monumen, pertama kali yang mereka jumpai adalah para pegawai yang akan menyambut para pengunjung. Namun keberadaan mereka kurang didukung oleh etalase yang menarik yang mendukung identitas Monumen Pers Nasional seperti apa.

Setelah revitalisasi, ruangan tersebut tampak sebagaimana berikut:

Foto 3a Setelah Revitalisasi



Sumber foto: Dokumen Monumen Pers Nasional. Setelah mengalami revitalisasi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa aspek perseptual pengunjung sangat menentukan penilaian. Desain interior yang memperlihatkan identitas kelembagaan, tatanan yang rapi dan artistik, yang ditunjang piranti-piranti yang mendukung pekerjaan setiap pranata Humas, yang bertugas menerima dan menyambut pengunjung, berdampak pada kesan yang diberikan.

Aspek penting yang menjadi basis pertimbangan dalam revitalisasi fisik mencakup: Kenyamanan, segi artistik, keseimbangan, keserasian dan kegunaan fungsional. Beberapa sisi kanan dan kiri dari front office tersebut merupakan display patung wajah para tokoh Pers Nasional dan display tentang perjalanan singkat Monumen Pers Nasional. Di area tersebut juga dipajang prasasti sebagai tanda peresmian berdirinya Monumen Pers Nasional. Menurut Widodo Hastjaryo, sisi kanan dan kiri dari front office sering digunakan untuk pengambilan gambar (baca: Syuting) dalam acara televisi dengan TA TV Solo.

Di luar bangunan, papan baca koran yang terbit setiap hari, juga direnovasi dan dipercantik. Kesan lusuh dan kusam, diubah menjadi cerah dan bersih. Luas papan baca sendiri diperbesar dari

semula sehingga lembar-lembar koran yang dipajang, yang dikunjungi masyarakat menjadi lebih rapi dan estetik.

Foto 4 Sebelum Revitalisasi



Sumber foto: Dokumen Monumen Pers Nasional.

Ruang baca bagi pengunjung semula tidak begitu memadai dan tidak begitu nyaman. Namun setelah direvitalisasi, suasana dan kenyamanan ruang baca Monumen Pers Nasional mengalami perubahan sebagaimana berikut:

Foto 4a Setelah Revitalisasi



Sumber Foto: Dokumen Monumen Pers Nasional

Penataan koran-koran lama, tempat baca dan posisi pegawai yang memberi pelayanan kepada pengunjung menjadikan tempat

penelusuran pengunjung terhadap dokumen-dokumen pemberitaan memberi kenyamanan. Kegunaan dan tujuan utama dari keberadaan Museum Monumen adalah sebagai sumber referensi dan riset.

Foto 5 Sebelum Revitalisasi



Sumber Foto: Dokumen Monumen Pers Nasional

Display patung wajah para tokoh pers Nasional tersebut semula disajikan kurang menarik dan gelap. Ada sejumlah tokoh pers yang terrepresentasikan pada patung-patung tersebut, antara lain: Dr. GSSJ Ratulangi, R.M Tirto Adhi Soeryo, R. Darmo Soegito, R.M Soedarjo Tjokrosisworo.

Foto 5a Setelah Revitalisasi



Sumber Foto; Dokumen Monumen Pers Nasional. Display ini setelah revitalisasi

Setelah direvitalisasi, display patung para tokoh pers Nasional jauh lebih hidup dan menarik. Informasi yang diberikan melalui display setelah direvitalisasi jauh informatif dan menarik.

Foto 6 Sebelum Revitalisasi



Sumber Foto: Dokumen Monumen Pers Nasional.

Ini merupakan ruang dimana para pegawai sedang mengubah koran-koran lama diubah ke dalam bentuk digital. Di ruangan ini proses digitisasi dokumen dan koran-koran yang dikoleksi Monumen Pers Nasional di lakukan. Suasana dan kenyamanan ruang itu dipandang kurang memadai sehingga ruang ini pun kemudian direvitalisasi.

Foto 6a Setelah Revitalisasi



Sumber Foto: Data Primer.

Ruang digitisasi koran-koran dan koleksi Monumen Pers Nasional setelah direvitalisasi. Desain ruang yang memberi nyaman bagi proses digitisasi yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Sebagaimana disebutkan oleh Kepala Monumen Pers Nasional masih

ada sekitar 180 ribu koran yang belum selesai diubah ke dalam bentuk digital.

Foto 7a Perpustakaan Sebelum Revitalisasi



Sumber Foto: Dokumen Monumen Pers.

Foto 7 memperlihatkan ruang Perpustakaan. Sebelum direvitalisasi tampak tempat duduk bagi pembaca perpustakaan terpisah dan mengesankan ruang yang telah lama dan usang terlihat dari lantai ruang yang masing menggunakan tegel.

Foto 7b Perpustakaan Sesudah Revitalisasi



Sumber Foto: Dokumen Monumen Pers

Foto 8a Sebelum Revitalisasi



Sumber Foto: Dokumen Monumen Pers

Foto 8b Sebelum Direvitalisasi



Sumber Foto: Monumen Pers Nasional

Foto 8ab Setelah Revitalisasi



Sumber Foto: Monumen Pers Nasional

Foto 8 ini adalah foto dimana artefak Radio yang sangat fenomenal dan terkenal dengan sebutan Radio Kambing. Radio ini merupakan radio pemancar yang pernah dipakai sebagai alat perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda.

Sebagai display semula, di Monumen Pers Nasional disajikan melalui penggambaran ada dua ekor kambing di pekarangan yang dibelakangnya adalah radio pemancar dan *power supply*-nya. Namun setelah direvitalisasi ilustrasi semacam itu diubah dengan melalui platform digital dengan metode *augmented reality*.

3.2 Diorama-Diorama Monumen Pers Nasional

Diorama adalah istilah yang dijumpai peneliti yang disebutkan oleh seorang pengelola Monumen Pers Nasional untuk merujuk pada penyajian-penyajian artefak-artefak komunikasi bidang pers yang menjadi koleks Monumen Pers Nasional. Diorama ini menurut penulis adalah metode penyajian yang lazim disebut sebagai Display.

Di dalam tulisan dikatakan bahwa:

The primary objective of museum management in shaping of knowledge can be achieved by a communication of meaning through quality displays of the permanent collection or temporary exhibitions, the specimens of a continent or the interactive apparatus of science. (Gnjatovic, 2014: 15)

Melalui kutipan itu sangat jelas bahwa penyajian menjadi hal yang penting bagi pengelolaan Museum atau Monumen. Dikatakan bahwa tujuan utama manajemen dari museum tentu saja termasuk Monumen Pers Nasional ini, adalah melalui penyajian yang berkualitas (*quality display*) atas koleksi-koleksi yang sifatnya permanen, atau terhadap eksibisi-eksibisi yang sifatnya temporal. Semua itu dimaksudkan agar tujuan utamanya di dalam membentuk pengetahuan, pengalaman dan daya Tarik dapat dicapai.

Jika dicermati secara mendetil, penyajian yang dilakukan di Monumen Pers, yang terlihat dari ruang ke ruang penyajian, maka ditemukan beberapa metode penyajian.

- a. Penyajian berdasarkan pada kronologis peristiwa. Display yang disebutnya sebagai Diorama dalam istilah pengelola Monumen Pers Nasional disusun berdasarkan kronologi waktu. Display ini mengurutkan kejadian berdasarkan pada urutan waktu. Secara tegas dalam display yang disajikan diperlihatkan waktu tahun dan tanggal kejadian. Dengan cara ini pengunjung diajak untuk membayangkan peristiwa berdasarkan konteks waktu kejadian.
- b. Penyajian berdasarkan pada tema. Display yang disajikan berdasarkan tema adalah pada isi dan peristiwanya itu sendiri. Di dalam display ini tidak terlihat kapan kejadiannya tetapi ditunjukkan apa kejadiannya. Seperti Display Radio Kambing, jika dicermati tidak ada penjelasan waktu yang tertera. Display ini lebih menekankan pada objeknya itu sendiri dan kejadiannya.
- c. Penyajian berdasarkan pada tokoh-tokoh. Display berdasarkan tokoh ini dapat dicermati dari penyajian sejumlah tokoh pers nasional dalam wujud patung wajah para tokoh. Meskipun para tokoh ini dapat disajikan berdasarkan pada urutan waktu, tetapi juga dapat disajikan berdasarkan pada seberapa besar pengaruh tokoh pers terhadap pers nasional
- d. Penyajian berdasarkan narasi/story telling. Metode ini mencerminkan perpaduan antara waktu, tempat kejadian, tema peristiwa dan tokoh-tokoh pelakunya. Narasi sebagai konstruksi peristiwa yang mencakup tokoh, peristiwa, waktu dan isi harus benar-benar dicek kevalidannya dan teruji keotentikannya sebagai narasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat metode ini dilakukan Monumen Pers Nasional. Catatannya adalah penyajian ini tampaknya belum memperhatikan secara serius hubungan antar ruang. Hubungan antar ruangan yang memperlihatkan jalinan antara display satu terhadap display yang lain masih belum diperhatikan.

Kekuatan pesan dan makna yang ditimbulkan selain metode yang tadi telah disebutkan, yakni penyajian berdasarkan pada kronologis, tematik/peristiwanya, tokoh-tokohnya dan metode naratif, sebagai hal yang penting, tetapi hubungan antar metode tersebut yang mungkin dapat diperlihatkan antar ruang dan dimensi, mesti juga diperhatikan.

Foto 9 Ruang Display Berdasarkan Narasi



Sumber Foto: Monumen Pers Nasional

Foto 10 Ruang Display Berdasarkan Kronologi Peristiwa



Sumber Foto: Monumen Pers Nasional

Foto 11 Display yang Memadukan Beberapa Metode



Sumber Foto: Monumen Pers Nasional

Revitalisasi fisik yang telah dilakukan membuka pintu bagi upaya-upaya inovasi dan terobosan strategis lainnya. Dalam langkah-langkah lebih lanjut, Monumen Pers Nasional dalam waktu tiga tahun terakhir yakni sejak 2018 hingga 2021.

Menurut Kepala Monumen Pers Nasional Widodo Hastjaryo melalui revitalisasi fisik inilah, Monumen Pers Nasional juga berupaya untuk melakukan revitalisasi menyangkut pencitraan Monumen Pers Nasional.

Terkait dengan perubahan jaman dan perilaku yang menjadi segmen Monumen Pers Nasional yang bertumpu pada generasi milenial ada keinginan untuk mengkonsultasikan perubahan logo, identitas dan tagline yang berhubungan dengan citra Monumen Pers Nasional ala Milenial.

Meskipun langkah-langkah ini belum sepenuhnya berhasil sebab hal-hal semacam ini harus dikonsultasikan dengan Kementerian, secara internal sendiri masih berada dalam taraf wacana. Beberapa diskusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan workshop tentang perubahan logo dan re-branding tentang Monumen Pers
- b. Penjaringan baik secara internal atau eksternal tentang tagline rasa milenial yang dapat dipakai dan digunakan Monumen Pers
- c. Mengkonsultasikan perubahan dan usulan mengenai logo dan tagline Monumen Pers Nasional kepada Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Revitalisasi fisik pada akhirnya menggerakkan pada revitalisasi kebijakan dan program. Kebijakan dan program ini sepertinya ingin diarahkan pada keterkenalan dan posisi Monumen Pers Nasional. Ia tidak dapat dilepaskan dari pers perjuangan dan perjuangan pers. Oleh karena itu suatu yang bersifat paradoks dan ironi misalnya, para jurnalis dan wartawan di Indonesia, tidak mengenal dan mengetahui apa itu Monumen Pers Nasional.

Seperti kata Bung Karno, jangan sekali sekali melupakan sejarah. Sejarah sebagai hal penting. Ia merupakan cermin bangsa. Dengan sejarah banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik. Sementara itu artefak-artefak komunikasi dalam bidang jurnalistik dan pers, sebagian besar ada dan tersimpan dalam Monumen Pers Nasional.

Melalui kajian-kajian komunikasi bidang pers dan jurnalistik yang secara material ada di Monumen Pers Nasional, konstruksi masa lalu dan apa yang telah terjadi pada bangsa Indonesia dapat diwujudkan. Interpretasi terhadap artefak-artefak komunikasi semacam ini sangat penting, tidak kalah penting dari artefak fosil-fosil manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Wacana komunikasi sebagai diskursus masyarakat, kekuasaan, budaya, ekonomi, politik dan militer serta praktek-praktek penyelenggaraan negara dapat digali kembali dan

dinterpretasikan dalam konteks Indonesia Merdeka, Indonesia Maju, Indonesia Emas dan Indonesia sejahtera.

Revitalisasi kebijakan dan program juga mengarah pada penyesuaian-penyesuaian atas perkembangan sosial, budaya dan teknologi yang ada. Di era Revolusi Industri 4.0 bahkan di negara lain telah dan sudah memasuki era Revolusi Industri 5.0, tata Kelola Monumen Pers Nasional juga mesti bergerak kearah perubahan itu.

Tren dan selera serta gaya hidup generasi milenial, diterima secara suka atau tidak suka, membuat Monumen Pers Nasional mengubah cara penyajian, pelayanan, dan prosedur. Karena itu, digitalisasi menjadi kenicayaan. Pelayanan informasi public pun dikemas secara digital melalui platform facebook, Instagram dan Website.

3.3 Tata Kelola Perawatan

Perawatan menjadi kunci bagi keawetan, otensitas dan nilai dari benda-benda yang menjadi koleksi Monumen Pers Nasional. Kontrol terhadap keberadaan benda-benda dan artefak-artefak komunikasi dilakukan untuk memastikan bahwa benda-benda tersebut aman, terpelihara dan terawasi keberadaannya.

Ada beberapa kondisi yang diperlihatkan terhadap teknis perawatan terhadap koleksi-koleksi yang dimiliki Monumen Pers Nasional. Pengubahan dokumen tertulis berbasis kertas yang rawan rusak, sobek, dan menjadi bubuk, diubah menjadi data secara digital merupakan Teknik perawatan yang dilakukan Monumen Pers. Konsep reservasi dan preservasi, keduanya berhubungan dengan masalah teknis perawatan atas koleksi-koleksi yang dimiliki dan dikuasai Monumen Pers Nasional.

Pembingkaiian dengan kaca, atau membatasi interaksi dengan pengunjung pada jarak tertentu, juga merupakan bentuk upaya

untuk memastikan agar artefak-artefak komunikasi terawat dan terjaga. Fungsi pendampingan pranata Humas yang bertugas mendampingi setiap pengunjung atau tamu pengunjung dan memberi penjelasan terhadap setiap artefak dari sisi konteks, isi dan tujuannya, juga berguna dan berfungsi dalam membantu perawatan terhadap keadaan Monumen secara keseluruhan.

BAB 4

DIGITALISASI MONUMEN PERS NASIONAL

4.1 Digitalisasi Koleksi Monumen

Transformasi digital Museum dan Monumen, itu sendiri dipicu oleh perkembangan teknologi informasi. Pergeseran industri yang berada pada revolusi industri 4.0 dan menuju ke revolusi 5.0 mendorong upaya berbagai sector ke dalam platform digital. Dalam banyak hal, praktek-praktek industri yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan bisnis, dapat dilakukan dan disajikan secara digital (Muktiyo, 2020:56-57; Hassan, 2020; Mosco, 2017).

Ada Sembilan ciri yang mendorong terjadinya digitalisasi sekaligus bagi derasnya aliran revolusi industry 4.0 di semua sector. Kesembilan ciri tersebut antara lain adalah: a) *Big data*; b) *Cloud System*; c) *Internet of Things*; d) *Artificial Intelligent*; e) *Augmented Reality*; f) *Robotics-Automation*.

Digitalisasi terhadap Monumen dan Museum seperti Monumen Pers Nasional, memperluas dan menaikkan eskalasi kemanfaatan dan integrasi kerja Monumen Pers Nasional. Teknologi digital telah menjadi piranti yang esensial bagi keseluruhan manajemen kerja dalam museum dan monument. Teknologi digital mencakup dan memperluas segi pengumpulan artefak dan data, deskripsi dari artefak-artefak, laporan-laporan konservasi, eksibisi-eksibisi, publikasi dan pengembangan lokasi dan objek-objek secara virtual dan online.

Ada tiga hal penting yang dicermati Trilce Navarette (2020) dalam melihat digitalisasi museum dan monument. Pertama, digitalisasi dalam penyelenggaraannya, yang berarti bagaimana Monumen Pers Nasional mengadopsi teknologi untuk kepentingan Digitalisasi. Kedua, menyangkut pelayanan yang diberikan terhadap permintaan-permintaan artefak-artefak yang dimiliki monument pers nasional. Ketiga, tata administrasi yang diselenggarakan secara internal.

Suatu rumusan model bagaimana Monumen Pers Nasional mengadopsi teknologi informatika dalam penyelenggaraan layanan kepada public dan bagaimana Monumen Pers Nasional memberi pelayanan terhadap jenis-jenis layanan itu sendiri yang terdigitlisasi.

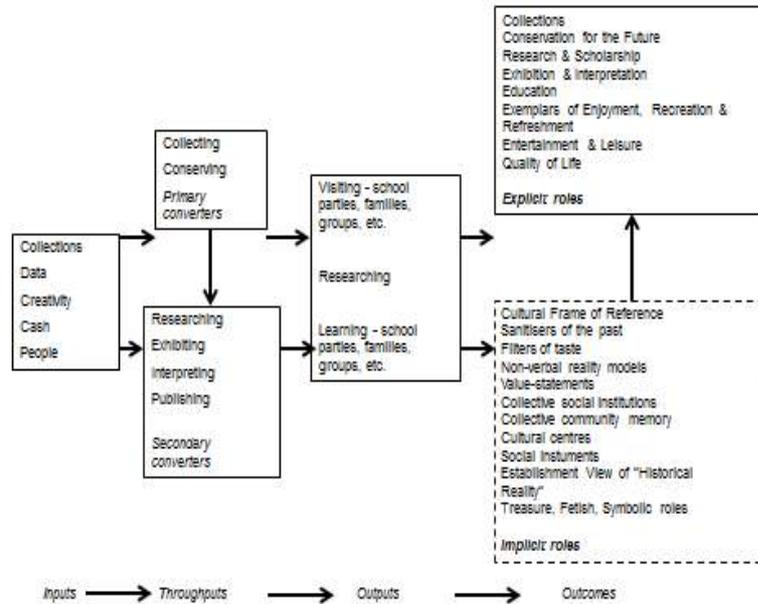
Model Digitalisasi Monumen Pers sebagai Pusat Informasi dan Kajian tentang Pers Nasional, dibangun berdasarkan pada analisis sistem. Artinya, pengidentifikasian terhadap situasi dan sumber daya yang ada, dan jenis-jenis pelayanan yang ada, menjadi acuan bagaimana model ini diwujudkan. Ada tiga aspek kunci, yang menjadikan model *feasible*. Pertama, adopsi teknologi informasi yang digunakan. Kedua, jenis-jenis pelayanan yang diberikan yang didigitalisasi. Ketiga, bagaimana model interaksi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan digitalisasi Monumen Pers Nasional serta kesinambungannya.

Melalui pendekatan sistem, unsur-unsur didudukan dan diposisikan pada peran masing-masing. Pada sisi lain, bagaimana kedudukan dan peran tersebut saling berhubungan yang menggerakkan beroperasinya suatu system tertentu. Dengan perkataan lain, model Digitalisasi Monumen Pers, tetap memadukan antara platform digital dan penyelenggaraannya.

Sistem semacam ini yang menjadi kerangka acuan, tanpa mengabaikan fungsi dan keberadaan Monumen Pers Nasional itu

sendiri, yang mengkoleksi, yang mendokumentasikan, yang memamerkan, dan mengemban tanggung jawab Pendidikan dan sejarah terhadap perjalanan Pers Nasional Indonesia.

Sebuah Model divisualisasikan oleh Alf Hatton (2009) menggambarkan alur dan tata Kelola Museum dan Monumen sebagai berikut:



Gambar 4.1.
Model Tata Kelola Kontemporer “Value Chain”

Model ini belum memasukkan unsur teknologi di dalam pengelolaannya. Organisasi dan teknologi bukan merupakan isu baru. Diskusi dan literatur yang membicarakan peran dan fungsi teknologi dalam organisasi cukup banyak dibicarakan dan didiskusikan. Misalnya buku yang ditulis oleh Eric M Eisenberg dan H.L Goodale Jr (2001) yang berjudul *Organizational Communication Balancing Creativity and Constraint*, di dalam babnya mencantumkan masalah teknologi dan organization. Paula O’Kane Owen Hargie, dan Dennis Tourish (2004) dalam tulisannya yang berjudul *Communication without Frontier: The*

Impact of technology upon organization, jelas menempatkan peran teknologi dalam organisasi.

Ada lima hal utama ketika teknologi informatika memasuki dan berperan bagi proses-proses dalam organisasi. Dalam konteks ini adalah bagaimana system informasi dan tata pengelolaan Monumen Pers Nasional dalam melakukan penyelenggaraan administrasi dan pelayanannya kepada public atau masyarakat.

Menurut Tom D Daniels, Barry K Spiker dan Michael J Papa (1997:171) ada lima tipe utama teknologi informatika dipakai dalam system manajemen dan tata Kelola administasi dan pelayanan, yakni:

- a. Dipakai untuk aktivitas akuntansi yang terkomputerisasi
- b. Proses integrasi data
- c. Integrasi system informasi manajemen
- d. Waktu riil dalam penyajian informasi dan data
- e. Proses pendistribusian informasi dan interaksi

Sudah sejak tahun 1960-an (Daniels, Spiker and Papa, 1997: 172) telah menyadari bahwa informasi merupakan sumber daya informasi, karena itu informasi harus dikelola dengan cara sebaik-baiknya secara efektif dan efisien. Untuk kepentingan ini, para pengembang software melakukan penelitian dan uji coba terus menerus dalam meningkatkan kendali dan proses integrasi data yang semakin tertata.

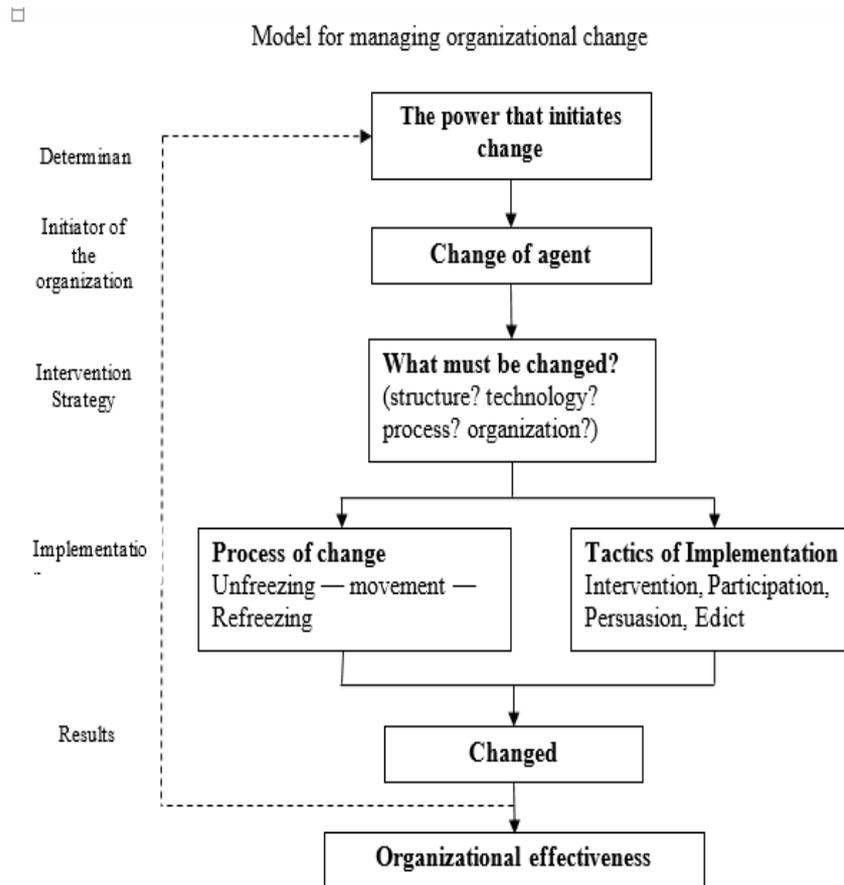
Adopsi dan adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi bagi organisasi dengan demikian sejumlah keniscayaan. Pertanyaannya kemudian teknologi informatika yang seperti apa yang akan dipakai? Software yang tepat digunakan bagi sistem administrasi dan pelayanan sebuah Monumen Pers? Bagaimana kesiapan teknologinya dan sumber daya manusia yang mengoperasionalkan teknologi tersebut?

Perpindahan dan budaya kerja, yang tadinya menggunakan metode manual, beralih secara digital dan computerized, merupakan masalah *organization change*. Perubahan bukan sesuatu yang mudah. Para pekerja, yang telah lama bekerja, umumnya telah nyaman dengan kondisi yang selama ini telah berlangsung. Apalagi tuntutan kerja dan perubahan berbasis teknologi tidak diiringi oleh perubahan dan peningkatan pendapatan. Dalam situasi semacam itu, bisa jadi perubahan bukan sesuatu yang dikehendaki.

Pimpinan atau Kepala Monumen Pers Nasional memegang peran penting dalam setiap perubahan yang ingin dicapai. Kepala Monumen Pers Nasional dapat dipandang sebagai *agent of change* bagi organisasi yang diarahkan pada upaya untuk mendigitalisasi sistem administrasi, sistem pelayanan serta sistem informasi manajemennya.

Kepala Monumen Pers Nasional perlu memahami kondisi yang ada (*existing conditions*) yang dengan pemahaman tersebut, ia dapat mengambil inisiatif yang tepat, menentukan arah perubahan yang ingin dicapai, dan memastikan proses-proses perubahan ini terjadi dan bergerak.

Model perubahan bagi organisasi dapat dicermati melalui alur yang dikonseptualisasikan oleh Steven Robbin (1994) sebagaimana berikut:



Source: Robbin 1994

Kepala Monumen Pers Nasional melalui otoritas dan kewenangan yang dimilikinya setelah melakukan konsultasi dan persetujuan dari Sekretaris Dirjen IKP, dapat melakukan keputusan-keputusan strategis terkait dengan adopsi dan adaptasi teknologi informatika dan sistem apa yang ingin dikembangkan.

Disebabkan prinsip kerja di dalam Monumen Pers Nasional sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Kominfo adalah kordinatif, integrative dan sinkronisasi, maka pilihan-pilihan sistem informasi manajemen yang dapat dikembangkan terkait jaringan informasi mencakup beberapa item:

- a. Local Area Network
- b. Wide Area Network
- c. Internet/World Wide Site

Di era Revolusi Industri 4.0 ini, hamper tidak mungkin untuk tidak mengadopsi dan mengadaptasi ketiga-tiganya. LAN dan WAN diperlukan ke dalam sistem jaringan yang lebih terbatas dan kebutuhan internal di antara mereka di Monumen Pers Nasional. Tetapi Ketika jaringan informasi ini harus tersambung secara internal baik secara nasional atau global, maka adopsi Internet dan World Wide Site menjadi keharusan.

Pilihan model jaringan informasi tersebut dilakukan terkait pula dengan pilihan data dan pekerjaan apa yang ingin dikordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan. Tentu saja, Monumen Pers Nasional harus membedakan mana data dan informasi yang sepenuhnya merupakan jaringan informasi secara internal dan mana data atau informasi yang sifatnya terbuka dapat diakses oleh siapa pun serta data dan informasi yang terkoneksi dengan stakeholder di luar Monnumen Pers Nasional.

Monumen Pers Nasional sendiri yang secara kelembagaan merupakan UPT dibawah Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang berarti adalah Lembaga/badan Publik, maka dengan sendirinya ia terkena ketentuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Di dalam ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik itu, terdefiniskan dan diatur sedemikian rupa tentang tata Kelola informasi public. Monumen Pers Nasional perlu mempertimbangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi yang bersifat layanan tentang Monumen itu sendiri, tetapi juga menyangkut tata laksana pengelolaannya yang menuntut pada transparansi dan akuntabilitas public atas organisasi birokrasi pemerintah.

Dengan demikian kebijakan digitalisasi Monumen Pers Nasional ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pilihan model jaringan informasi yang ingin dipakai
- b. Pengidentifikasi data dan informasi apa berdasarkan pada pilihan jaringan informasi yang diinginkan
- c. Mempertimbangkan Efektifitas dan efisiensi system berbasis pada pengerjaan yang kordinatif, integrative dan sinkron
- d. Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengawai
- e. Peran Kepala Monumen Pers Nasional dalam menginisiasi dan memastikan proses digitalisasi Monumen Pers Nasional berjalan
- f. Waktu yang diperlukan untuk benar-benar sampai pada tahap beroperasi
- g. Dukungan anggaran

Ada implikasi yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan pimpinan dalam hal ini oleh Kepala Monumen Pers Nasional. Implikasi ini dipahami untuk memperkirakan apa dampak atau akibat sampingan yang mungkin terjadi Ketika penerapan teknologi semacam ini digunakan. Implikasi-implikasi yang mesti diantisipasi adalah:

- a. Apakah dengan melakukan adopsi dan adaptasi melalui teknologi informasi tersebut, ada jenis pekerjaan yang kemudian tereliminir atau bebannya menjadi sangat turun drastis. Jika hal ini demikian, bagaimana pimpinan melakukan pengalihan, penggantian atau upgrading terhadap kapasitas dan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan terhadap tata Kelola yang baru
- b. Ketika semuanya serba teknologi informasi, apakah hal ini mempengaruhi kualitas interaksi dan kedekatan emosional pengawai yang sesuai amanat Peraturan Menteri tentang Tata Kelola dan Kerja Organisasi Monumen Pers Nasional ini menekankan pada kordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Apakah

hal ini cukup memadai jika dilakukan melalui sistem informasi jaringan

Pendek kata, Digitalisasi Monumen Pers Nasional memiliki ranah yang cukup luas dan kompleks. Persoalan digitalisasi tidak cukup dipahami dari segi teknis yakni efektif dan efisien, serta hanya mempertimbangkan daya Tarik kunjungan, tetapi masalahnya juga terkait dengan budaya kerja, jenis data dan informasi, pola interaksi, dan budaya organisasi itu sendiri.

4.2 Pengelolaan Media Sosial

Bagian penting lainnya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan media social seperti Youtube, Podcast, Instagram, Facebook, dan Twitter. Baik perorangan, komunitas, perusahaan dan pemerintahan pada akhirnya juga memanfaatkan media sosial bagi fungsi-fungsi informasi dan komunikasi.

Demikian pula yang dilakukan oleh Monumen Pers Nasional. Mereka semakin menyadari bahwa perilaku masyarakat bermedia telah mengalami perubahan secara revolusioner dari media-media lama seperti televisi, koran, majalah, radio, tabloid ke platform media-media baru seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Podcast dan lainnya.

Perkembangan tren penggunaan media-media baru ini sangat massif dan sangat cepat. Berdasarkan survey yang dilakukan Hootsuite misalnya sebagai laporan tahunan, Januari 2021 tercatat tren dan perkembangan sebagai berikut:

Kategori Media	Tren Penggunaan
Internet	202,6 juta
HP	345,3 juta
Medsos	170,0 juta

Sumber: Hootsuite 2021

Penggunaan HP (Smartphone) mencapai lebih dari jumlah penduduk Indonesia karena banyak dijumpai seseorang memiliki dan menggunakan lebih dari satu smartphone dan lebih dari satu provider. Lebih dari 70 persen penduduk telah menggunakan media sosial dan hamper mencapai 95 persen menggunakan Internet.

Jika data ini difokuskan 60system60 pemanfaatan media social seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Whatshapp misalnya, maka berdasarkan pada sumber yang sama, yakni Hootsuite 2021, diketahui kecenderungannya sebagai berikut:

1. Youtube berada pada peringkat pertama yakni 93,8 persen dari populasi Indonesia
2. Whatshapp menempati peringkat kedua, yakni 87,7 persen dari populasi Indonesia
3. Facebook menempati urutan ketiga, yakni 86,6 persen dari populasi Indonesia
4. Instagram menempati urutan keempat yakni, 85,5 persen dari populasi Indonesia
5. Twitter berada pada peringkat kelima yakni 63,6 persen dari populasi Indonesia

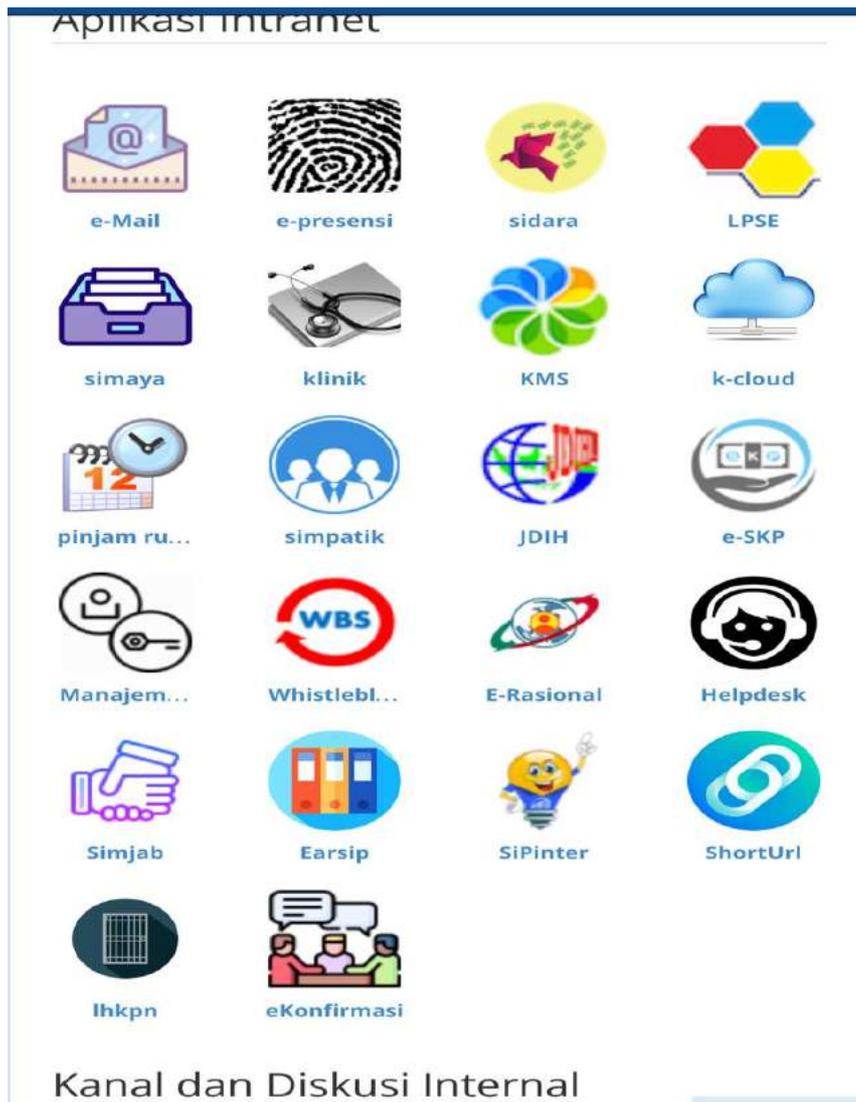
Dengan demikian, karakteristik perilaku masyarakat bermedia telah beralih kepada pemanfaatan media sosial. Media sebagaimana dikatakan oleh Marshall Mc Luhan sebagai perluasan eksistensi manusia, kecenderungan pemanfaatan media berhubungan secara linear dengan kepentingan dan kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat.

Di sisi lain, media juga diartikan sebagai *message delivery system*-yakni merupakan sistem penyampaian pesan. Media ditempatkan sebagai alat penyampai pesan. Karena itu, semua media patut dipertimbangkan sebagai media penyampai pesan. Keunggulan kompetitif satu media dipakai untuk melengkapi kelemahan media

yang lain. Dengan perkataan lain, sebagai sistem penyampaian pesan, fungsi dan kegunaan media dintegrasikan menjadi sebuah kekuatan penyampaian.

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maka sejumlah platform media dan aplikasi, Monumen Pers Nasional menginduk pada sejumlah platform dan aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Namun demikian, penggunaan seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube, Monumen Pers Nasional memiliki dan mengelolanya secara mandiri untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat informatif yang perlu disampaikan kepada publik. Beragam platform media social yang digunakan itu mencerminkan bahwa integrasi media diperlukan untuk memberi dampak signifikan secara positif terhadap keberadaan Monumen Pers Nasional.

Berikut ini adalah sejumlah platform dan aplikasi yang digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baik yang berkaitan dengan sistem manajemen organisasi, aktivitas komunikasi publik dan sistem administrasi serta kepegawaian:



Sumber: Monumen Pers Nasional

Aplikasi-aplikasi tersebut dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang difungsikan untuk membantu kerja dan fungsi manajemen organisasi. Tata Kelola data, administrasi, dokumen-dokumen, produk peraturan, presensi kepegawaian, dan prosedur kerja serta pelayanan telah menggunakan aplikasi teknologi informatika. Aplikasi intranet ini memperjelas bahwa tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan tata Kelola yang berbasis teknologi informatika.

Selain apa yang telah dikembangkan tersebut, sebagaimana telah disinggung, bahwa pengelolaan dan penggunaan media sosial dilakukan oleh Monumen Pers Nasional. Gambaran singkat terhadap media-media sosial yang digunakan Monumen Pers Nasional sebagai berikut:

1. Facebook Monumen Pers Nasional. Monumen Pers Nasional mengelola Facebook. Di dalam facebook tersebut terdapat menu yang terdiri dari Beranda, Tentang, Foto, Ulasan dan Lainnya yang di dalamnya dibagi lagi Video dan Komunitas. Di dalam Beranda dan Tentang tercantum alamat di mana Monumen Pers Nasional, jumlah yang mengikuti Facebook (saat dicek: 193) merupakan jumlah yang masih jauh dari harapan. Alamat Web site yang dapat diakses, No HP yang dapat dihubungi, tagline (Pusat Rujukan Dokumentasi Pers Nasional), dan Jam Kerja. Adapun menu Foto terbagi menjadi Album dan Semua Foto. Di dalamnya berisi foto-foto kegiatan dan peristiwa-peristiwa tertentu yang terkait dengan Monumen Pers Nasional. Pada Menu Ulasan terdapat Rekomendasi dan Ulasan. Namun begitu, pada bagian Menu ini tidak terlihat adanya aktivitas yang memadai. Akhirnya, pada Menu Lainnya, bagian ini memperlihatkan video-video kegiatan dan komunitas yang berkaitan dengan kegiatan Monumen Pers Nasional
2. Instagram Monumen Pers Nasional. Dibandingkan dengan Facebooknya, Instagram Monumen Pers Nasional diikuti sebanyak 638. Jumlah postingan yang telah dilakukan sebanyak 611 postingan. Banyak icon-icon yang tersaji di dalamnya, seperti Giveaway, Jelajah Virtual, Pameran, Lokakarya, Kunjungan, Reservasi, HPN 2021, New Normal dan lainnya. Ada pun foto-foto yang diunggah banyak poster dan kegiatan-kegiatan Monumen Pers Nasional itu sendiri.
3. Youtube Monumen Pers Nasional. Youtube juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi kepada publik. Dengan mengikuti fitur

yang dimiliki Youtube, Monumen Pers Nasional menyajikan beberapa segi melalui penyajian secara audiovisual. Beberapa yang sudah dilakukan antara lain menyajikan “Apa Kata Mereka tentang Papan Baca”, Jelajah Virtual, Ngopi Bareng di Monumen Pers dan lainnya.

4.3 Tata Kelola Administrasi Digital

Sebagai organisasi, Monumen Pers Nasional pasti menyelenggarakan dan mengelola administrasi yang bermacam-macam seperti administrasi kepegawaian, anggaran, penggajian, dan pengelolaan anggaran kegiatan. Semua hal ini menyangkut bagaimana dokumen-dokumen kerja dan cara pekerjaan diselesaikan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Monumen Pers Nasional merupakan UPT dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Di tingkat pusat tata kelola administrasi ini berkaitan dengan tata kelola administrasi pemerintahan dan negara.

Tanpa mengabaikan persoalan-persoalan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mengembangkan platform digital yang dipakai untuk mendukung dan membantu fungsi-fungsi administrasi organisasi.

Dilihat dari kelembagaan, Monumen Pers Nasional Surakarta berada di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maka pengembangan tata kelola administrasi organisasi secara digital menginduk pada pengembangan tata kelola administrasi ditingkat kementerian.

Misalnya aplikasi digital Simaya, yang digunakan untuk berbagai macam jenis persuratan, baik persuratan untuk pembuatan Nota Dinas, surat elektronik, dan surat disposisi. Dalam tata kelola surat persuratan, Monumen Pers Nasional Surakarta menggunakan aplikasi Simaya. Alamat email pegawai yang berada di bawah

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, menggunakan format `namapegawai@kominfo.go.id`.

Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik yang dikenal di kalangan kepegawaian pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan SIMPATIK merupakan aplikasi digital yang dipakai untuk pengelolaan kepegawaian yang mencakup data pegawai, portofolio kepegawaian, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, kursus, mutasi dan karir.

Aplikasi lain adalah JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang juga merupakan aplikasi digital yang dikembangkan dan digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Meskipun demikian itu, pengelolaan secara administratif bagi Monumen Pers Nasional Surakarta ini, patut untuk dikembangkan tata kelola dan kerja sesama unit dan fungsi di dalamnya. Sebab, untuk diketahui bahwa keberadaan Monumen Pers Nasional Surakarta ini berada di kota Solo, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ada di Jakarta.

Tata kelola organisasi khususnya tata kelola administratif di dalamnya dijalankan oleh kepegawaian yang ada di Monumen Pers Nasional Surakarta. Artinya, ada sistem aplikasi yang dipakai dan menginduk kepada aplikasi yang diterapkan pada kementerian, tetapi ada tata kelola yang tetap harus dijalankan tersendiri oleh Monumen Pers Nasional itu sendiri. Di sinilah diperlukan, sistem pengelolaan mandiri.

Pertama, jenis pekerjaan apa saja yang menjadi kegiatan rutin dalam organisasi Monumen Pers Nasional. Kedua, dari jenis pekerjaan yang ada, jenis pekerjaan apa saja, yang sistem aplikasi digitalnya sudah diakomodir oleh sistem aplikasi digital yang telah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta

Kementerian terkait, dan jenis pekerjaan yang seperti apa yang tidak terakomodir dalam sistem aplikasi yang telah ada.

Ketiga, memastikan terlebih dahulu, perlu tidaknya sistem aplikasi digital terhadap jenis pekerjaan dan mekanisme kerja terhadap hal-hal yang tidak diakomodir dalam sistem aplikasi digital yang telah ada. Jika telah dipastikan diperlukan, maka sistem aplikasi digital yang seperti apa.

Keempat, dalam pembuatan sistem, yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur apa yang ada di dalamnya. Sedangkan setiap unsur itu berfungsi dan digunakan untuk menjalankan pekerjaan yang seperti apa.

Kelima, bagaimana menjalankan unsur-unsur tersebut dalam bentuk interaksi dan hubungan kerja yang ideal, efektif dan efisien. Hubungan semacam ini memperlihatkan proses pekerjaan dijalankan dan hasil yang dicapai.

Keenam, bagaimana sistem kendali dan kontrol terhadap sistem tersebut. Sebaik apapun sistem yang dibangun, namun jika kendali dan kontrol agar sistem ini tetap bekerja tetap diperlukan. Mekanisme ini pada gilirannya menghasilkan ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban, reward dan punishment.

BAB 5

PENUTUP

Model Digitalisasi Monumen Pers sebagai Pusat Informasi dan Kajian tentang Pers Nasional sebagai luaran penelitian, dibangun berdasarkan pada analisis sistem. Artinya, pengidentifikasian terhadap situasi dan sumber daya yang ada, dan jenis-jenis pelayanan yang ada, menjadi acuan bagaimana model ini diwujudkan. Ada tiga aspek kunci, yang menjadikan model *feasible*. Pertama, adopsi teknologi informasi yang digunakan. Kedua, jenis-jenis pelayanan yang diberikan yang didigitalisasi. Ketiga, bagaimana model interaksi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan digitalisasi Monumen Pers Nasional serta kesinambungannya.

Melalui pendekatan sistem, unsur-unsur didudukkan dan diposisikan pada peran masing-masing. Pada sisi lain, bagaimana kedudukan dan peran tersebut saling berhubungan yang menggerakkan beroperasinya suatu sistem tertentu. Dengan perkataan lain, model Digitalisasi Monumen Pers, tetap memadukan antara platform digital dan penyelenggaraannya.

Sistem semacam ini yang menjadi kerangka acuan terhadap arah penelitian terapan ini, tanpa mengabaikan fungsi dan keberadaan Monumen Pers Nasional itu sendiri, yang mengkoleksi, yang mendokumentasikan, yang memamerkan, dan mengemban tanggung jawab Pendidikan dan sejarah terhadap perjalanan Pers Nasional Indonesia.

Agar mekanisme sistem dapat berjalan dengan baik, maka setiap elemen dalam sistem perlu dijabarkan fungsi dan perannya. Alur dan hubungan kerja yang harus dibangun. Sebagai

sistem, relasi-relasi yang ada mesti terjabarkan dan terakomodir dalam aplikasi digital yang ingin dikembangkan.

Proses input dan output dalam sistem patut memperkirakan asal input, dan proses pengolahan input sebagai mekanisme kerja dan tata kelola organisasi. Ketika prosesnya dan relasi-relasi yang dibangun di dalam sistem dapat dideskripsikan dengan baik, maka hasil dari kerja yang dikelola akan memberikan kegunaan dan prestasi yang terukur.

Di dalam sistem tata kelola yang dikembangkan melalui digitalisasi, tidak mungkin dapat dijalankan dengan baik, tanpa adanya system cybernetic. Apa yang dimaksud dengan sistem cybernetic adalah sistem kendali dan kontrol terhadap beroperasinya sistem.

Dalam operasi sistem sosial yang ditransformasikan ke dalam sistem aplikasi digital, sistem cybernetic diatur ke dalam fungsi, peran, kewajiban dan regulasi-regulasi yang mengaturnya apabila fungsi, peran dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana dipersyaratkan di dalam sistem yang diciptakan.

Prinsip-prinsip sistem yang baik mesti mengacu pada sejumlah atribut. Misalnya, sistem ini memiliki kemampuan untuk menstabilkan keadaan jika terdapat gangguan dan hambatan. Setidaknya semacam alarming dan warning sehingga operator dalam sistem dapat segera menindaklanjuti ada tanda awal adanya gangguan atau tidak berjalannya fungsi dari sistem atas aplikasi digital tertentu.

Terhadap elemen-elemen yang mesti dimasukkan ke dalam fitur sistem aplikasi atau harus diperbaharui, aplikasi semacam ini mesti ada. Dengan demikian, sistem aplikasi mesti memadukan bagian-bagian yang terkunci sebagai sesuatu yang tertutup, dan bagian-bagian yang terbuka.

Agar mekanisme sistem dapat berjalan dengan baik, maka setiap elemen dalam sistem perlu dijabarkan fungsi dan perannya. Alur dan hubungan kerja yang harus dibangun. Sebagai sistem, relasi-relasi yang ada mesti terjabarkan dan terakomodir dalam aplikasi digital yang ingin dikembangkan.

Proses input dan output dalam sistem patut memperkirakan asal input, dan proses pengolahan input sebagai mekanisme kerja dan tata kelola organisasi. Ketika prosesnya dan relasi-relasi yang dibangun di dalam sistem dapat dideskripsikan dengan baik, maka hasil dari kerja yang dikelola akan memberikan kegunaan dan prestasi yang terukur.

Di dalam sistem tata kelola yang dikembangkan melalui digitalisasi, tidak mungkin dapat dijalankan dengan baik, tanpa adanya system cybernetic. Apa yang dimaksud dengan sistem cybernetic adalah sistem kendali dan kontrol terhadap beroperasinya sistem.

Dalam operasi sistem sosial yang ditransformasikan ke dalam sistem aplikasi digital, sistem cybernetic diatur ke dalam fungsi, peran, kewajiban dan regulasi-regulasi yang mengaturnya apabila fungsi, peran dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana dipersyaratkan di dalam sistem yang diciptakan.

Prinsip-prinsip sistem yang baik mesti mengacu pada sejumlah atribut. Misalnya, sistem ini memiliki kemampuan untuk menstabilkan keadaan jika terdapat gangguan dan hambatan. Setidaknya semacam alarming dan warning sehingga operator dalam sistem dapat segera menindaklanjuti ada tanda awal adanya gangguan atau tidak berjalannya fungsi dari sistem atas aplikasi digital tertentu.

Terhadap elemen-elemen yang mesti dimasukkan ke dalam fitur sistem aplikasi atau harus diperbaharui, aplikasi semacam ini mesti ada. Dengan demikian, sistem aplikasi mesti memadukan

bagian-bagian yang terkunci sebagai sesuatu yang tertutup, dan bagian-bagian yang terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Milena Gnjatovic, 2014, *Problems of Museum's Image Building During Museum's Reconstruction: Case Study*, Belgrade: Thesis Unpublished
- Elizabeth Crooke, 2007, *Museum and Community: Ideas, Issues and Challenges*, London: Routledge
- Arofah, Kurnia and Suparno, Basuki Agus, 2019, "Communication Culture of Sangiran World Heritage Site Society: Ethnography Study, People: International Journal of Social Science, Vol 5 Number 3
- Suparno, Basuki Agus and Kurnia, Arofah, 2021, "Developing Sangiran Archaeological Site as Tourism Destination: Social Expectations and Governmental Policy's Constraints" *Journal of Indonesia Tourism and Development Studies*, Vol 9, No.1
- Michael Foucault, 1970, *The Archeology of Knowledge*, New York: Pantheon
- Navarrete, Trilce, "Digitization of Museums, in Trine Bille, Anna Mignosa, and Ruth Towse 2020, *Teaching in Cultural Economics*, Brisbane: Edward Elgar Publishing Guides to Teaching
- Hassan, Robert, 2020, *The Condition of Digitality*, London: University of Westminster Press
- Muktiyo, Widodo, 2020, *Gagasan dan Pemikiran Komunikasi Publik*, Jakarta: Dirjen IKP Kominfo
- Mosco, Vincent, 2017, *SocietyNow Becoming Digitality*, London: Emerald Publishing

